

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI
TALAK KARENA POLIANDRI (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

SILMI LADYALDINA ADNANI
1602056058

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
Perum Beringin Asri No. 1018 RT 05 RW 12
Wonosari, Ngaliyan Semarang

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
Jl. Megaraya No. 3 No.446 KaveriBringinNgaliyan

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri (Silmi Ladyaldina Adnani)

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **Silmi Ladyaldina Adnani**
NIM : **1602056058**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAH TALAK KARENA POLIANDRI(Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg)”**

Dengan ini telah kami setujui dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP.19711101 200604 1003



Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP. 19791022 200701 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Silmi Ladyaldina Adnani
NIM : 1602056058
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. (Penguji 1)
2. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. (Penguji 2)
3. Anthin Lathifah, M.Ag. (Penguji 3)
4. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~* dengan nilai: 3,83 (B+).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

BRILIYAN ERNA WATI

*coret yang tidak perlu

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ

قُنُتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْأَعْيُنِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

ۚ فَإِنِ اطَّاعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 34).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada hentinya.
2. Adik-adikku tersayang: Lulu Salsabylla, Syemsi Tabriza, dan Rahda Shaqila yang selalu memberikan semangat setiap harinya.
3. Mbah uti dan Nenek tercinta yang senantiasa memberikan doa.
4. Kedua Pembimbing, Bapak Muhammad Shoim dan Ibu Novita Dewi Masyithoh yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membangun.
5. Pihak Pengadilan Agama Semarang, khususnya Bapak Drs. H. Husin Ritonga, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah menerima dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan banyak dukungan dan doa.
7. Sahabat-sahabatku: Salma Tika, Nia, Mba Eka, Aulia, Audia, Rere.
8. Teman-teman Ilmu Hukum 2016 dan Teman-teman KKN Posko 82 Desa Glawan, Kecamatan Pabelan, Kab. Semarang, dan
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Terimakasih atas seluruh doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tiada upaya yang dapat penulis lakukan, hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah membalas semua yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan dan keberkahan. Aamiin ya Rabbalalamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab,

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 11 April 2020

Deklarator,



Silmi Ladyaldina Adnani
NIM. 1602056058

Abstrak

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam perkara perceraian, tentunya hakim tidak akan dengan mudahnya memutus dan mengabulkan perceraian tersebut. Segala upaya harus dilakukan seperti melakukan mediasi terlebih dahulu guna mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana telah diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga perlunya dalil-dalil konkret sebagai pembuktian untuk dapat dikabulkannya perceraian tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg terdapat perkara cerai talak karena adanya poliandri. Namun dikarenakan poliandri bukan merupakan salah satu dasar yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sehingga dalam putusan tersebut hakim menisbatkan perceraian tersebut disebabkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang dan untuk melakukan analisis terhadap putusan hakim dalam perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg. Dalam penelitian ini juga menguraikan mengenai penemuan hukum yang secara tidak langsung dilakukan oleh hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian tergolong penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara tersebut, dan juga data sekunder yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Pengadilan Agama Semarang telah melakukan penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg sesuai dengan prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai talak yang telah diamanatkan dalam UU Peradilan Agama. Kedua, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, hukum islam, dan kaidah fihiyyah yakni mencegah kemadharatan lebih diutamakan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Menurut hemat peneliti, meskipun tidak ada aturan yang mengatur bahwa poliandri dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian, namun disini terlihat bahwa hakim melakukan penemuan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg dapat dikategorikan perkara cerai talak karena poliandri.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Cerai Talak, Poliandri, Penemuan Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, hidayah serta inayah-Nya kebaikan dan keberkahan-Nya senantiasa menyertai kita. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Dengan segala rasa syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Cerai Talak karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg) guna memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Tentunya ini semua tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa doa, bimbingan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih penulis kepada:

1. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
2. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan segala yang tak ternilai kepada penulis.
4. Kepada pihak Pengadilan Agama Semarang, khususnya Bapak Drs. H. Husin Ritonga, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah menerima dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Sahabat-sahabatku, Salma Tika, Nia, Mba Eka, Aulia, Audia, Rere.
7. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2016.
8. Teman-teman lainnya dan saudara-saudara tercinta yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, April 2020

Penulis



Silmi Ladyaldina Adnani
NIM. 1602056058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN TEORI	13
A. Gambaran Umum Perceraian	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Talak	13
2. Rukun dan Syarat-syarat Cerai Talak	15
3. Macam-macam Talak	19
4. Akibat Cerai Talak	23
B. Gambaran Umum Poliandri	24
1. Pengertian Poliandri	24
2. Poliandri Menurut Hukum Islam	25
3. Poliandri Menurut Hukum Positif	27
4. Poliandri dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis	29
C. Gambaran Umum Pertimbangan Hakim	30
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	30

2. Kedudukan Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	31
3. Dasar Pertimbangan Hakim.....	33
D. Penemuan Hukum oleh Hakim.....	35
BAB III : PENYELESAIAN PERKARA CERAH TALAK KARENA POLIANDRI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang.....	42
B. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak karena Poliandri di Pengadilan Agama Semarang.....	50
C. Upaya Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Talak Karena Poliandri Ddalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg.....	53
BAB IV : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAH TALAK KARENA POLIANDRI DALAM PUTUSAN Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg	
A. Alasan Pengajuan Permohonan Cerai Talak dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg.....	72
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg.....	73
BAB V : PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan sebagai manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram, dan bahagia dalam sasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Sejalan dengan pendapat Subekti yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹

Pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa perkawinan yang baik yaitu perkawinan yang mencakup sifat sakinah (tentram), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (sayang). Hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." Tetapi dalam kenyataan yang ada saat ini, tidak selamanya pasangan suami isteri itu dalam kehidupan rumah tangganya selalu merasakan kebahagiaan dan ketenteraman. Adakalanya pasangan suami isteri tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan yang membahayakan ikatan perkawinan mereka.

Keadaan seperti diatas terkadang masih dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian, sehingga diantara kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dapat hidup rukun kembali seperti semula sebelum adanya suatu permasalahan. Karena dalam suatu kehidupan, manusia tidak akan terlepas dari yang namanya masalah, terlebih dalam kehidupan berumah tangga. Masalah dalam rumah tangga ialah hal yang wajar. Diantara suami isteri masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai sesuatu, namun saat sudah berumah tangga, hal tersebut seharusnya bisa diredam oleh keduanya, masing-masing harus bisa mengendalikan ego masing-masing agar masalah tidak membesar. Tetapi ada pula dalam perselisihan dan percekocokkan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai. Sehingga apabila keadaan yang demikian itu dilanjutkan, maka

¹ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. 2, no. 2, Februari 2012, 167.

² Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), 13.

untuk mewujudkan keluarga yang kekal, bahagia, damai, dan sejahtera tidak akan terwujud sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam rumah tangga, suami isteri diwajibkan untuk bisa saling menjaga kepercayaan dan kesetiaan terhadap pasangannya. Karena salah satu mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal ialah dengan menjaga kepercayaan dan kesetiaan terhadap pasangannya. Apabila salah satu pasangan telah mengingkari kepercayaan yang telah diberikan oleh pasangannya, maka perselisihan dan percekocokkan akan terjadi. Hal yang demikian itu dapat menimbulkan adanya perceraian.

Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pada perjalanannya perkawinan dapat berakhir. Yaitu jika disebabkan oleh : kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.³

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg terdapat suatu perkara cerai talak, perceraian yang mana dilakukan oleh pihak suami sebagai Pemohon terhadap pihak isteri sebagai Termohon dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tahun 2016 disebabkan Pemohon marah mendapati Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara sirri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut.

³*Ibid.*, 17.

Kasus diatas dapat dikategorikan sebagai kasus perceraian karena poliandri. Poliandri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* berarti banyak, *aner* berarti negatif, dan *andros* berarti laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal daripada poliandri.⁴ Menurut Ali Husein Hakim, mengatakan “poliandri yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami.”⁵

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” Namun pada umumnya perkawinan tidak selalu berlangsung secara monogami, tetapi tidak jarang dijumpai perkawinan poligami dan poliandri. Perkawinan poligami adalah suatu asas dalam Undang-Undang Perkawinan, dengan suatu pengecualian yang ditunjukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang.⁶ Perkawinan monogami dan perkawinan poligami diperbolehkan baik dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum Islam. Dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dijelaskan pula dalam hukum Islam bahwa laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Diterangkan dalam Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya :

“Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi masing-masing dua, tiga, atau empat, kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja, atau kawinilah budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tindakan tidak berbuat aniaya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3).

Sedangkan perkawinan poliandri dimana seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami tidak diperbolehkan, karena perkawinan tersebut akan merusak kemurnian keturunan, bercampur aduknya sperma beberapa orang laki-laki pada satu perempuan yang mana akan membuat status seorang anak tidak jelas, laki-laki mana yang menjadi bapak dari anak tersebut.

Hukum poliandri di Indonesia dapat ditelusuri pada Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

⁴ Ensiklopedia Indonesia, Jilid V, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve), 2736.

⁵ Ali Husein Hakim., et al., *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Terj. A.H Jemala Gemala, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 172.

⁶ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta, 1992), 3.

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Dalam perkara cerai talak yang terdapat dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg. hakim telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permintaan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, namun putusan tersebut bukan dengan alasan poliandri. Karena hakim lebih menisbatkan perkara tersebut dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian, tentunya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuluterhadap putusan yang akan diambilnya. Jadi pengadilan yang bersangkutan, sebelum memutuskan perkara perceraian harus dan bahkan wajib mendamaikan kedua belah pihak. Putusan perceraian baru boleh dijatuhkan setelah usaha mendamaikan mengalami kegagalan.⁷

Adapun mengenai kasus poliandri, Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan secara langsung tentang poliandri sebagai alasan perceraian. Dalam keadaan demikian, hakim sebagai penegak hukum dituntut kebijakannya untuk menjatuhkan putusan yang berkeadilan dan dapat dieksekusi melalui hak dan tanggung jawab *ex officio*. Hak dan tanggung jawab *ex officio* ini diberikan kepada hakim agar hakim dapat melakukan penemuan hukum meski harus melalui terobosan hukum agar dapat menemukan keadilan. Hakim juga dituntut kejelian dan ketelitiannya dalam menjatuhkan putusan. Apa landasan hukum yang digunakan dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena poliandri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah terkait :

1. Bagaimana penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg?

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), cet II, 149.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penyelesain perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang
- b. Untuk mengetahui analisis putusan hakim dalam perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan suatu manfaat dan kegunaan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu :

a. Secara teoritis

- 1) Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum perkawinan dan perceraian, khususnya terkait masalah poliandri.
- 2) Bahwa penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan bagi yang memerlukannya.

b. Secara praktis

1) Pengadilan Agama

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa masukan kepada praktisi hukum di Pengadilan Agama Semarang terkait dalam hal memutus perkara cerai talak karena poliandri berdasarkan Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg.

2) Masyarakat

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis pribadi serta masyarakat luas terkait masalah perkawinan dan perceraian karena poliandri.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis mengambil sumber dari beberapa karya ilmiah atau jurnal untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung.

1. Skripsi Miftahul Arwani, tahun 2008, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007).” Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan. Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo terhadap perceraian karena perselingkuhan tidak murni atau

berdiri sendiri. Alasan perselingkuhan dinisbatkan kepada perkara pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan keretakan rumah tangga.⁸

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sebab terjadinya perceraian tersebut, yang mana dalam skripsi penulis perceraian disebabkan karena poliandri, sedangkan skripsi diatas, perceraian disebabkan karena perselingkuhan.

2. Skripsi Robet Rifa'i, tahun 2017, UIN Walisongo Semarang, yang berjudul "Analisis terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)." Skripsi ini membahas mengenai praktik poliandri yang telah dilakukan oleh seorang wanita yang memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan yang telah terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.⁹

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada metode penelitiannya. Skripsi penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan skripsi diatas menggunakan metode yuridis empiris, yakni pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Selain itu, perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, yang mana dalam skripsi penulis yakni seorang penegak hukum (hakim), sedangkan dalam skripsi diatas, objek penelitiannya ialah seseorang, lembaga, dan masyarakat.

3. Skripsi Pardi, tahun 2013, UIN Riau Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, yang berjudul "Analisis Perkawinan Poliandri menurut Hukum Islam (Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010/PA.Pbr)." Skripsi ini membahas mengenai praktik poliandri yang dilakukan antara Ibu Ameti binti Azim dengan Bapak Sardiono dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010/PA.Pbr adalah dengan cara memalsukan akta cerai.¹⁰

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis. Adapun perbedaan skripsi penulis dengan skripsi diatas yakni terkait dengan analisis yang akan dilakukan. Dalam skripsi penulis, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena poliandri. Sedangkan skripsi diatas lebih memfokuskan pada analisis perkawinan poliandri menurut hukum Islam.

⁸ Miftahul Arwani, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008.

⁹ Robet Rifa'i, "Analisis terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang tahun 2017.

¹⁰ Pardi, "Analisis Perkawinan Poliandri menurut Hukum Islam (Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010/PA.Pbr)", *Skripsi* UIN Riau Sultan Syarif Kasim Pekanbaru tahun 2013.

4. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam karya Syahrizal Abbas dan Datul Mutia, tahun 2019, UIN Ar-Raniry, yang berjudul “Putusan Talak Raj’i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH.” Dalam penelitian ini, Putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH telah sesuai dengan hukum Islam. Fokus masalah yang dilihat oleh hakim pada putusan tersebut yaitu terjadinya ketidakharmonisan yang mengakibatkan terjadinya poliandri sehingga hakim menilai bahwa perilaku Termohon tidak baik dan menjatuhkan martabat Pemohon sebagai seorang suami.¹¹

Jurnal tersebut berbeda dengan skripsi penulis. Adapun perbedaan skripsi dengan jurnal tersebut ialah terkait fokus analisis yang akan dilakukan. Dalam skripsi penulis, penulis akan menganalisis mengenai poliandri dengan menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga hukum Islam. Sedangkan dalam jurnal diatas, lebih menitikberatkan analisis poliandri dalam hukum Islam.

5. Jurnal Fakultas Hukum karya Rudianto Hutagalung, tahun 2017, yang berjudul “Praktik Poliandri Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.” Dalam jurnal ini, praktik poliandri terjadi di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, adapun alasan terjadinya poliandri dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan dan perceraian, jarak tempuh menuju pengadilan jauh sehingga apabila seorang isteri atau suami yang hendak cerai maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk menuju pengadilan.¹²

Jurnal tersebut berbeda dengan skripsi penulis. Adapun perbedaan jurnal diatas dengan skripsi penulis ialah terletak pada fokus kajiannya. Dalam skripsi penulis, penulis lebih menitikberatkan untuk menganalisa terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak karena poliandri, yakni terkait peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan dalam jurnal tersebut fokus kajiannya adalah dengan cara terjun ke lapangan untuk mengetahui praktik poliandri secara langsung.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹³ Menurut

¹¹ Syahrizal Abbas dan Datul Mutia, “Putusan Talak Raj’i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol.3. no. 1 (Januari-Juni 2019), 205-222.

¹² Rudianto Hutagalung, “Praktik Poliandri Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”, *JOM Fakultas Hukum*, vol. IV, no. 1 (April 2017), 1-15.

¹³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 24.

Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu termasuk teori hukum yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.¹⁵ Penelitian ini juga merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mensinkronisasikan suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peneliti menggunakan jenis penelitian doktrinal karena dalam skripsi ini peneliti hendak menguji apakah suatu aturan tertentu dapat atau tidak dapat memecahkan suatu masalah hukum tertentu, yakni hukum *in concreto*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menelaah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg.

¹⁴Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Ed. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet 1, 86.

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet VII, 25.

¹⁶*Ibid.*, 105.

¹⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Ed. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet 1, 172.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet 11, 94.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).¹⁹ Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada seorang hakim Pengadilan Agama Kelas I A Semarang yang menangani perkara tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²¹ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²² Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Semarang Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian, jurnal, data-data dari Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, dan lain sebagainya.

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 214.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode*, 106.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 216.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.²⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.²⁶ Dalam penelitian ini, dokumen yang hendak penulis gunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.²⁷ Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terstruktur. Wawancara bebas yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulkan.²⁸ Adapun pihak yang hendak diwawancarai ialah seorang hakim Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, Bapak Drs. Husin Ritonga yang telah memutus perkara cerai talak karena poliandri pada Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg.

5. Teknik Validitas Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian data kualitatif, sehingga untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data yang peneliti tulis dapat berupa teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode*, 106.

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 216.

²⁶ *Ibid.*, 217.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 95.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 233.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 270.

yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.³⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasisumber adalah teknik yang mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.³¹ Triangulasi sumber dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada seorang hakim Pengadilan Agama Kelas I A Semarang yakni Bapak Drs. Husin Ritonga yang telah memutus perkara tersebut dan observasi terhadap dokumen-dokumen tertulis, arsip data-data yang ada di Pengadilan Agama Kelas I A Semarang.

6. Analisis Data

Analisis data yakni data atau bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya. Selanjutnya dilakukan cross-check dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adakah inkonsistensi diantara peraturan perundang-undangan tersebut.³² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Setiap penulis pasti mengharap tulisannya dapat dimengerti dan dipahami sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan penulis. Untuk itu, agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah, komprehensif, dan sistematis, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I, yakni Pendahuluan yang meliputi : Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II, merupakan Tinjauan Teori mengenai : Gambaran Umum tentang Perceraian yang meliputi pengertian dan dasar hukum cerai talak, rukun dan syarat-syarat cerai talak, macam-macam talak, akibat cerai talak; Gambaran Umum tentang Poliandri yang meliputi pengertian poliandri, poliandri menurut hukum Islam, poliandri menurut hukum positif, poliandri dalam perspektif psikologis dan sosiologis; Gambaran Umum tentang Pertimbangan Hakim yang meliputi pengertian pertimbangan hakim, kedudukan pertimbangan hakim dalam putusan, dasar pertimbangan hakim, dan penemuan hukum oleh hakim.

BAB III, mengenai penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang. Dalam bab ini, dibahas sekilas mengenai gambaran umum Pengadilan Agama

³⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 330.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid.*, 267.

Semarang, prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang, dan upaya hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg.

BAB IV, mengenai analisis putusan hakim dalam perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg. penulis menganalisa tentang alasan pengajuan permohonan cerai talak dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg, sehingga nampak apakah poliandri dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

BAB V, yakni Penutup yang meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, daftar pustaka, dan juga lampiran.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Talak

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Dalam hukum Islam perceraian biasa disebut “*talaq*”. *Talaq* berasal dari kata “*ithlaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.³³

Al-Jaziry mendefinisikan, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.³⁴

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.³⁵

Perceraian dalam bahasa Indonesia disepakati dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fikih yang berarti bubarnya perkawinan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang

³³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet I, 155.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 192.

³⁵ *Ibid.*

lebih mendidik kedua belah pihak, setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian satu-satunya sebab alasan terjadinya perceraian suami istri.³⁶

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, dikenal istilah “Cerai Talak” dan “Cerai Gugat”. Cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Demikian juga menurut ketentuan Pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 119 KUH Perdata, bubarnya perkawinan dapat terjadi karena:

- a. Kematian salah satu pihak.
- b. Tidak hadirnya suami istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru.
- c. Karena pisah meja dan ranjang; dan,
- d. Perceraian.

Selain ketentuan yang berada dalam perturan perundang-undangan, dasar hukum cerai talak juga terdapat dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah Ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 227)³⁷

Adapun hadis mengenai perceraian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

إِنَّ إِبْلِسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَحْيِيءُ

أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَحْيِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ

حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُذْنِبُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ

“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian mengirim pasukannya (ke berbagai penjuru). Pihak yang terdekat kedudukannya dari Iblis adalah yang paling besar menimbulkan fitnah. Salah satu dari mereka datang (menghadap Iblis) dan

³⁶ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 56.

³⁷<https://tafsirweb.com/867-surat-al-baqarah-ayat-227.html>, diakses 12 Januari 2020

menyatakan: Aku berbuat demikian dan demikian. Iblis menyatakan: engkau belum berbuat apa-apa. Kemudian datang satu lagi (melaporkan): Aku tidak tinggalkan ia (manusia) hingga aku pisahkan ia dengan istrinya. Kemudian Iblis mendekatkan kedudukannya dan mengatakan: bagus engkau.” (H.RMuslim)³⁸

2. Rukun dan Syarat Cerai Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:³⁹

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadits dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.

“Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada kepemilikan.”

Abu Daud dan Al-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Amir ibn Syu'aib bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا نَذَرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَ لَا طَّلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

“Tidak ada nazar bagi anak Adam (manusia) tentang hal yang baik dimiliki, tidak ada pemerdekaan budak dalam hal yang tidak dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki.”

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- 2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

³⁸ Astricha, “Perceraian Menurut Islam dan Dalilnya”, <https://dalamislam.com/hukum-islam/perceraian-menurut-islam>, diakses 12 Januari 2020.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 201-205.

- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالتَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكَرَّهُوا عَلَيْهِ.

“Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.”

- b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan bekas suami.
 - 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaanya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.
- c. Sighat Talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

- d. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.

Syarat-syarat perceraian tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:⁴⁰

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Perceraian tidak boleh terjadi hanya karena permufakatan suami dan istri, harus ada alasan-alasan sah yang mendasarinya. Dalam Pasal 209 KUH Perdata, alasan-alasan ini ada empat macam:

- a. Zina.
- b. Ditinggalkan dengan sengaja.
- c. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Dalam Pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Pasal selanjutnya, Pasal 114 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Adapun yang menjadi alasan perceraian dijelaskan dalam Pasal 116 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁴⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, 157-158.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, pada poin huruf f dapat diketahui kerap kali perceraian terjadi karena faktor tersebut. Dalam hukum Islam, perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dapat disebut *Syiqaq*. *Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.⁴²

Menurut istilah, *syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁴³

Sedangkan menurut bahasa, *syiqaq* artinya persengketaan, perpecahan. Adapun yang dimaksud adalah perpecahan atau perselisihan antara suami istri. Apabila di antara kaum muslimin melihat atau menyaksikan terjadinya *syiqaq* di antara suami istri, mereka harus berusaha merukunkan dan mendamaikannya kembali dengan cara mengangkat seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan seorang hakam dari pihak keluarga perempuan.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bagian penjelasan umum tentang Pasal 76 Ayat (1), disebutkan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.

Pengertian *syiqaq* yang dirumuskan dalam peraturan perundangan tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam Surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Jogjakarta: Penerbit Academia, 2012), 175.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 194.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 241.

⁴⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2008), 277.

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. 4 [An-Nisa]: 35)⁴⁵

Hukum Islam menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. Dari segi individu, yang menjatuhkan talak harus seseorang yang baligh, berakal, dan taat. Maka talak itu tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang mabuk.
- b. Dari segi ucapan, para ulama fikih menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak. Seperti "engkau aku talak".
- c. Adapun dari segi tujuan, talak haruslah dengan "ucapan". Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak diucapkan dengan talak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seseorang yang mengucapkan talak karena dipaksa atau saat mabuk maka talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akalunya.
- d. Adapun dari segi jumlah, Al-Qur'an menentukan batas talak hanya boleh dilakukan sampai dengan tiga kali, dan setelah itu (mencapai talak tiga kali) suami istri yang bersangkutan tidak bisa rujuk (bercampur lagi). Berdasarkan firman Allah Swt:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. 1 [Al-Baqarah]: 229)⁴⁷

- e. Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fikih bahwa kesaksian adalah wajib dalam talak, yang artinya harus ada yang menyaksikan dalam hal menjatuhkan talak. Berdasarkan firman Allah Swt:

⁴⁵<https://tafsirweb.com/1567-quran-surat-an-nisa-ayat-35.html>, diakses 20 April 2020.

⁴⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, 159-160.

⁴⁷<https://tafsirweb.com/871-surat-al-baqarah-ayat-229.html>, diakses 16 Januari 2020.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (Q.S. 28 [Ath-Thalaq]: 2)⁴⁸

3. Macam-macam Talak⁴⁹

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

- a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:
 - 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
 - 2) Istri bisa segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu'), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
 - 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i ialah:
 - 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c. Talak La Sunni wa La Bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:
 - 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.

⁴⁸<https://tafsirweb.com/10982-surat-at-talaq-ayat-2.html>, diakses 16 Januari 2020.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 193-201.

- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak*, *firaq*, dan *sarah*, ketiga kata itu disebut dalam Al-Qur'an dan hadits.

Ahl Al-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

- b. Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
- 4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
- 5) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
- 6) Susullah keluargamu sekarang juga.
- 7) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.
- 8) Beriddahlah engkau dan bersihkan kandunganmu itu.
- 9) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
- 10) Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika

suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Dr. As-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

- b. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak ba'in ada dua macam, yaitu talak ba'in shugro dan talak ba'in kubro.

- 1) Talak ba'in shugro ialah talak ba'in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnyapun maupun sesudah berakhir masa iddahnyapun.

Termasuk talak ba'in shugro ialah:

- a) Talak sebelum berkumpul.
- b) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu'.
- c) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

- 2) Talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnyapun. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.

- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraann orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

4. Akibat Cerai Talak⁵⁰

Menurut ketentuan Pasal 149 sampai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat talak yaitu:

- a. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), 164-167.

- 2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijanjikan talak ba'in atau nusyuz, dan dalam keadaan hamil.
 - 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*.
 - 4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- b. Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.
 - c. Bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.
 - d. Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di atas bersumber dari beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an, yaitu:

- a. QS. Al-Baqarah [2]: 236

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

- b. QS. Al-Baqarah [2]: 237

"Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan."

- c. QS. Al-Baqarah [2]: 233

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

- d. QS. Al-Baqarah [2]: 228

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) mengehendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

e. QS. At-Thalaq [65]: 1

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

B. Poliandri

1. Pengertian Poliandri

Hukum perkawinan pada dasarnya ada tiga asas perkawinan, yaitu asas monogami, asas poligami, dan asas poliandri. Asas monogami adalah asas perkawinan yang hanya memiliki satu pasangan. Asas poligami adalah asas perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu orang istri. Sedangkan asas poliandri adalah asas perkawinan dimana seorang istri memiliki lebih dari seorang suami.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” Jadi disini dapat disimpulkan bahwa asas monogami adalah asas perkawinan yang hanya memiliki satu pasangan. Namun pada umumnya perkawinan tidak selalu berlangsung secara monogami, tetapi tidak jarang dijumpai perkawinan poligami dan poliandri.

Kata poligami terdiri dari kata *poli* artinya banyak dan *gami* istri.⁵¹ Poligami berasal dari bahasa Yunani, *polos*, *polus*, atau *polys* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin. Istilah poligami berarti pada saat atau waktu bersamaan seorang laki-laki dengan banyak wanita atau wanita dengan banyak laki-laki.⁵²

Poligami juga dapat diartikan perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih.⁵³ Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua, yakni poligini dan poliandri. Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'did zaujah* (bilangan pasangan), dalam Islam poligami hanya dibatasi kepada empat istri. Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*.⁵⁴

⁵¹MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 351.

⁵²Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), 17.

⁵³Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1947), 606.

⁵⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 151. Lihat juga Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 639.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam istilah poligini. Poligini untuk suami yang beristri banyak, berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus* yang berarti banyak dan *gyne* atau *gune* yang berarti istri (perempuan). Poligini dapat berarti bahwa seorang laki-laki dalam waktu yang sama berkawin dengan seorang wanita, tetapi dapat pula terjadi dengan masa antara. Alasan poligini pada umumnya untuk mendapatkan kerja yang lebih banyak, sebagai pelambang kekuasaan atau pengaruh dan kekuasaan lelaki, untuk mendapatkan kekuatan atau gaya hidup sakti dari wanita, pada masyarakat Ghadhu Bhaga poligini bertujuan untuk mengurangi *bue duge*, perawan tua terutama wanita *rank gae meze* (bangsawan besar).⁵⁵

Poliandri adalah istri yang bersuami banyak (lebih dari satu). Berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus* yang berarti banyak dan *ane* atau *andros* yang berarti suami (laki-laki). Poliandri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang.⁵⁶ Artinya adalah wanita yang digauli oleh banyak laki-laki dalam kurun waktu yang sama.

2. Poliandri Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya Islam tidak melarang poligami (poligini). Poligami (poligini) adalah perkawinan dimana seorang laki-laki (suami) menikah dengan beberapa perempuan (istri). Poligami (poligini) diperbolehkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۚ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. 4 [An Nisa]: 3)⁵⁷

Poligami (poligini) diperbolehkan selama dapat berlaku adil terhadap semua istrinya, tetapi sekiranya tidak bisa berbuat adil, maka cukup dengan seorang istri. Oleh karena itu poligami (poligini) bukanlah kewajiban atau anjuran kuat, tetapi hanya izin yang diberikan pada suatu kondisi tertentu.⁵⁸

Berbeda halnya dengan poligami (poligini), poliandri adalah perkawinan dimana seorang perempuan (istri) menikah dengan beberapa laki-laki (suami). Poliandri dilarang oleh agama Islam, poliandri bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan poliandri dapat menimbulkan dampak negatif berupa penyakit venera, yaitu penyakit yang dijangkiti

⁵⁵Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan*, 17.

⁵⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 81.

⁵⁷<https://tafsirweb.com/1535-quran-surat-an-nisa-ayat-3.html>, diakses 30 Maret 2020.

⁵⁸Muhammad Abdul Halim, *Memahami Al-Qur'an dan Pendekatan Gaya dan Tema*, (Bandung: Marja, 2002), 70.

melaalui hubungan seksual yang berganti-ganti. Sebab poliandri identik dengan kupu-kupu malam (PSK) yaitu wanita yang suka menjual diri kepada para pria (pelacur).⁵⁹

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram, hal ini berdasar kan firman Allah SWT:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 24)⁶⁰

Ayat diatas menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami yang dalam hal ini disebut *al-Muhshanat*.⁶¹

Allah menanamkan mereka dengan *al-Muhshanat* karena mereka menjaga *farij-farij* (kemaluan) mereka dengan menikah. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa kata *al-Muhshanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka tetapi wanita yang bersuami (*dzawah al-azwaj*).⁶²

Bahkan Imam Syafi’i menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan “wanita-wanita yang bersuami, baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai atau *fasakh* nikah, kecuali al-sabaya (budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang yang suaminya tidak ikut tertawan bersama).”⁶³

Untuk itu jelas bahwa wanita yang bersuami haram dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain bahwa ayat di atas merupakan dalil al-Qur’an atas haramnya poliandri. Adapun dalil al-Sunnah yang melarang poliandri adalah hadis Rasulullah yang memiliki arti: “Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya.”⁶⁴

Hadis tersebut di atas secara tersirat menunjukkan bahwa jika dua orang walimenikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan wali yang pertama, dengan kata lain hadis tersebut menunjukkan bahwa tidaklah sah pekawinan seorang wanita kecuali dengan seorang suami saja. Dengan demikian jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah, baik berdasarkan dalil al-Qur’an maupun dalil al-Sunnah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

⁵⁹ A. Ja’far, “Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis”, *Al-Adalah*, vol. X, no. 3, 2012, 325-330.

⁶⁰ <https://tafsirweb.com/1556-quran-surat-an-nisa-ayat-24.html>, diakses 10 Maret 2020.

⁶¹ Syeh Taqiyudin Al-Nabhani, *al-Nizham al-Ijtima fi al-Islam*, (Bayrut: Darul Ummah, 2003), 110.

⁶² Imam al-Syâfi’i, *al-Umm*, Juz V, Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 134. Lihat juga al-Syâfi’i, Imam, *Ahkam Alquran*, Juz. I, Bayrut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1989.

⁶³ Imam Syafi’i, *Akhmalul Qur’an Juz I*, (Bayrut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1985), 184.

⁶⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz. 2, (Dar al-Fikr, t.th), 359.

3. Poliandri Menurut Hukum Positif

Pada dasarnya di Indonesia sendiri asas perkawinan yang diutamakan adalah asas monogami, yaitu seorang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan seorang istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Pada praktiknya, dalam masyarakat Indonesia kerap kita jumpai peristiwa poligami dan poliandri. Poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Di Indonesia, poligami diperbolehkan sebagai suatu pengecualian. Tapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.⁶⁵

Pengadilan dalam memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang yakni dengan mengacu pada Pasal 4 Ayat (2), yang berbunyi:

“Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Selanjutnya, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, maka seorang suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 5 UU Perkawinan, yang berbunyi:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) Huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

⁶⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 55-56.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.”

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kendatipun demikian, kebolehan melakukan poligami bagi seorang suami terbatas hanya sampai empat orang istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Dengan demikian maka perkawinan poligami di Indonesia diizinkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan mengenai perkawinan poliandri di Indonesia dapat ditelusuri pada Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Kendati dalam Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dinyatakan secara tegas larangan untuk melakukan poliandri, namun dapat ditelusuri melalui Pasal 3 Ayat (2), dimana Pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai pemberian izin kepada suami yang ingin memiliki lebih dari seorang istri, namun tidak mengatur ketentuan mengenai seorang istri yang ingin memiliki suami lebih dari satu orang. Hanya laki-laki saja yang boleh terikat lebih dari satu tali perkawinan, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan terikat dengan lebih dari satu ikatan perkawinan.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia maupun dalam Hukum Islam, hanya memperbolehkan praktek poligami saja, sedangkan praktek poliandri tidak diperbolehkan atau dilarang dan juga haram dalam Syari’at

Islam. Apabila seorang wanita melakukan poliandri, maka perkawinannya tersebut tidaklah sah di mata hukum dan Pengadilan Agama dapat membatalkannya.

4. Poliandri dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis⁶⁶

Dalam perspektif psikologis, poliandri merupakan bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hati nurani dan fitrah manusia, bahkan bertentangan dengan kesehatan, sebab poliandri merupakan bentuk perkawinan di mana seorang wanita (istri) menikah dengan beberapa suami, sehingga seorang istri bisa berganti-ganti pasangan (suami) yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan pelacur.

Secara medis, kebanyakan perempuan pelacur menderita kanker rahim. Setiap sperma laki-laki berbeda, di mana masing-masing memiliki kode khusus dan dalam jasad perempuan ada semacam *organ micro komputer* yang menyimpan kode laki-laki yang membuahnya. Jika dalam *micro komputer* itu sudah masuk satu kode laki-laki, apabila ada kode laki-laki lain masuk, maka kode itu akan menjadi virus terhadap *micro komputer* dalam jasad perempuan tersebut yang akhirnya dapat menyebabkan *error* dan *chaos* dalam bentuk penyakit yang mematikan.

Secara psikologis juga dapat mengganggu kejiwaan atau ketenangan jiwa seorang istri, sebab ia harus melayani beberapa suami. Sementara perempuan (istri) merupakan pihak yang disayang, dijaga, dilindungi dan dihormati, bahkan dalam kodratnya sebagai wanita ia harus diperlakukan lemah lembut bukan sebagai pemuas laki-laki (suami). Demikian juga apabila seorang istri mengambil posisi suami, tentunya kewajiban sebagai istri yang sesungguhnya akan terganggu, bahkan sanget bertentangan dengan syariat Islam, dalam hal ini yang menjadi kepala keluarga adalah suami bukan istri. Hal ini sebagaimana firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

⁶⁶ A. Ja'far, “Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis”, *Al-Adalah*, vol. X, no. 3, 2012, 325-330.

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. 4 [An Nisa]: 34)⁶⁷

Dengan demikian, dalam perspektif psikologis poliandri tidak dibenarkan, sebab di samping dapat mengganggu ketenangan jiwa istri, juga dapat menjatuhkan kehormatan suami istri dan dapat menimbulkan penyakit yang mematikan bagi suami istri.

Sedangkan dalam perspektif sosiologis, poliandri dapat mendatangkan banyak masalah, baik terhadap keluarga maupun masyarakat, di lingkungan keluarga, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan mendapat celaan dari keluarganya, sebab itu tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anak dan keluarga pada umumnya, begitu juga di mata suami tentunya ia tidak mempunyai harga, sebab ia dianggap wanita (istri) yang tidak bisa menjaga martabat keluarga, sehingga bisa jadi oleh keluarga akan diasingkan. Demikian halnya di lingkungan masyarakat, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan dinilai hina oleh masyarakat, bahkan akan dianggap sebagai wanita (istri) murahan yang tidak berguna, karena oleh masyarakat ia dipandang tak ubahnya seperti Pekerja Seks Komersial (PSK), yaitu wanita yang suka menjual dirinya kepada para pria.

Selain itu dalam hal hubungan/nasab anak, apabila istri mempunyai beberapa suami (poliandri), maka hubungan atau nasab anak akan menjadi tidak jelas, yakni hanya ibu kepada anak saja yang dapat diketahui, sedangkan ayah tidak, padahal Islam mengenalkan duaduanya, sehingga dalam masyarakat ia akan malu jika ditanya mana ayahnya.

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Di dalamnya memuat analisis yang jelas memuat berdasarkan Undang-Undang pembuktian sebagai berikut: bertitik tolak dari analisis tersebut, pertimbangan melakukan argumentasi mengenai pembuktian dalil gugat atau dalil bantahan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hal tersebut hakim menjelaskan mengenai pendapatnya yang dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai landasan penyelesaian perkara yang dituangkan dalam diktum putusan. Dan bila putusan dinyatakan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan serta mempertimbangkan pertimbangan hukum perkara maka putusan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama.⁶⁸

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan

⁶⁷<https://tafsirweb.com/1566-quran-surat-an-nisa-ayat-34.html>, diakses 30 Maret 2020.

⁶⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 809-810.

mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶⁹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷⁰

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat/Pemohon harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁷¹

2. Kedudukan Pertimbangan Hukum dalam Putusan⁷²

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangatlah penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Menurut Hukum dan Perundang-undangan.

Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.

⁶⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. V, 140.

⁷⁰*Ibid.*, 141.

⁷¹*Ibid.*, 142.

⁷² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 109-111.

Putusan yang berdasarkan pertimbangan menurut hukum sering disebut sebagai putusan legal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Anggapan keliru ini perlu diluruskan sehubungan dengan proses lahirnya suatu undang-undang di mana oleh eksekutif dan legislatif segala analisis dan alasan keadilan telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama.

Azas legalistic harus diartikan hakim bukan sekadar sebagai corong undang-undang yang hanya sekadar melekatkan pasal dari undang-undang terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus dapat menerjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut up to date dan dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

b. Pertimbangan Demi Mewujudkan Keadilan

Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian.

Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.

c. Pertimbangan Untuk Mewujudkan Kemaslahatan

Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal; maslahat dan mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum Islam (*ushul fiqh*) “*Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih.*”

Ruang lingkup kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam menurut *ushul fiqh* secara berurutan adalah sebagai berikut: a. Kemaslahatan dalam memelihara agama; b. Kemaslahatan dalam memelihara jiwa; c. Kemaslahatan dalam memelihara akal; d. Kemaslahatan dalam memelihara keturunan; e. Kemaslahatan memelihara harta.

Abdul Wahab Khollaf berpendapat, bahwa untuk menggunakan *hujjah* kemaslahatan sampai kepada pembentukan hukum atas peristiwa yang tidak ada peraturan perundang-undangannya atau telah ada peraturan perundang-undangannya tetapi tidak jelas harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut harus pasti, bukan atas dasar duga-duga.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus merupakan kemaslahatan umum, bukan maslahat yang bersifat perorangan.
- 3) Pembentukan hukum melalui maslahat tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash/perundang-undangan atau ijma'.

Untuk mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat bergantung kepada kecerdasan hakim melalui kemampuan analisis yang cermat, objektif, dan empirik termasuk wawasannya tentang 'urf atau tradisi, meskipun hasil kajiannya terbatas pada kemaslahatan duniawi.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi ruang kebebasan bagi hakim untuk merefleksikan bunyi undang-undang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, bunyi undang-undang menjadi hidup bermoral keadilan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”⁷³

Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur kemandirian hakim, dan Pasal 5 undang-undang tersebut mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim

⁷³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 3.

harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁷⁴

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.⁷⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu memuat:

- a. Alasan-alasan yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
- b. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung.
- c. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- d. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral *justice*.
- e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (Pasal 53 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Alasan dan dasar hukum yang diterapkan dalam pertimbangan hukum tersebut, hakim bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya (Pasal 53 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut). Bahwa putusannya dipertanggungjawabkan sesuai pertimbangan hukum yang dibuatnya.

4. Penemuan Hukum oleh Hakim

⁷⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), 2.

⁷⁵ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126-127.

Dalam praktik tidak jarang dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap atau tidak jelas. Memang tidak ada hukum atau perundang-undangan yang sangat lengkap atau jelas sejelasmungkin. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Di samping itu, kepentingan manusia akan terus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dengan demikian, pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁷⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dalam nash Al-Qur'an, dalam menerapkan hukum, hakim harus menerapkan dengan adil. Sebagaimana firman Allah Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 58)⁷⁷

Pada dasarnya hakim memang harus menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai produk politik, tidak mudah diubah dengan cepat mengikuti

⁷⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 28.

⁷⁷<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, diakses 7 Januari 2020.

perubahan masyarakat. Di sisi yang lain, dalam kehidupan modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahan yang segera.⁷⁸

Seandainya hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Selain hal tersebut, pengetahuan hakim mengenai fakta dan peristiwa dalam kasus yang dihadapinya merupakan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan hukum yang ia ketahui itu.⁷⁹

Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu sangat berkaitan dengan persoalan normatif dan filsafat hukum. Sebab, tugas mengadili berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Paund mengatakan bahwa salah satu objek filsafat adalah *The Application of Law*.⁸⁰ Menurut Golding, sebagai *The critical evaluation of laws and legal institution...and the study of judicial decision making*.⁸¹ Oleh karena itu, tugas hakim dalam mengadili maka tidak lepas dari kegiatan penemuan hukum. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 59)⁸²

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.⁸³

⁷⁸ Mukhsin Asyrof, “Asas-asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan”, *Artikel dalam Varia Peradilan*, no. 252, 2006.

⁷⁹ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 204.

⁸⁰ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), cet I, 59.

⁸¹ *Ibid*.

⁸² <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>, diakses 7 Januari 2020.

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), cet V, 37.

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalaninterpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverwijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum).⁸⁴

Sedangkan menurut John Z Laudoe, mengemukakan bahwa penemuan hukum adalah penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu terdapat dalam undang-undang yang ada.⁸⁵

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum.⁸⁶ Hal ini berkaitan dengan Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيِّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ

تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

(سنن الترمذي: ١٢٥٢)

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju’fi dari Za’idah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan kepadaku: "Jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku terus menjadi hakim. Abu Isa berkata: Hadits ini hasan.” (Sunan Tirmidzi: 1252)

Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks, yang pada dasarnya dimulai sejak hakim memeriksa kemudian mengadili suatu perkara hingga dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Kegiatan-kegiatan hakim itulah pada umumnya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, tetapi momentum dimulainya suatu penemuan hukum ialah setelah peristiwa konkretnya dibuktikan

⁸⁴N.E. Algra dan Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, oleh J.C.T Simorangkir dkk., (Bandung: Bina Cipta, 1983), 359.

⁸⁵ John Z. Laudoe, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 69.

⁸⁶ B. Arief Sidharta, *Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Unpad, 1999), 15-17.

atau dikonstatasi, karena pada saat itulah peristiwa konkret yang telah dikonstatasi tersebut harus dicarikan atau diketemukan hukumnya.⁸⁷

Dalam suatu persidangan, hakim tentunya akan menyelidiki apakah ada hubungan hukum yang menjadi perkara itu benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum ini harus dibuktikan dimuka hakim dan ini adalah tugas kedua belah pihak yang berperkara untuk memberikan bahan-bahan bukti yang diperlukan, membuktikan dalam arti membenarkan hubungan hukum.⁸⁸

Jadi, dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim harus melakukan 3 (tiga) tahap tindakan di persidangan, yaitu sebagai berikut:⁸⁹

1. Tahap Mengkonstatir

Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, mak diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, di mana dalam perkara perdata, sebagaimana dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi, akan dapat dihindarkan dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan gegabah.

Sebagai contoh: jika dalam perkara perdata adalah para pihak yang berperkara yang wajib untuk membuktikan melalui penggunaan alat-alat bukti. Dalam tahap konstatir ini kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini.

2. Tahap Mengkualifikasi

Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum (apakah itu pencurian, penganiayaan, perzinaan, perjudian, atau peralihan hak, perbuatan melawan hukum, dan sebagainya).

Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi jika tidak jelas atau tidak tegas hukumnya, maka hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, tetapi lebih dari itu ia harus menciptakan hukum, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 80.

⁸⁸ Elise T. Sulistini, Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), cet II, 32.

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998) 92-94.

perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zamannya.

3. Tahap Mengkonstituir

Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri, demikian sebagaimana dikemukakan oleh Sir Alfred Denning, seorang hakim Inggris yang terkenal.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya *in concreto* terhadap peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*). Di sini hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari *premis mayor* berupa aturan hukumnya dan *premis minor* berupa perbuatan/tindakannya.

Jika diperhatikan secara saksama, maka gambaran proses ataupun cara penemuan hukum dapat diamati dengan dimulai pada tahap kualifikasi dengan menilai peristiwa konkret yang dianggap benar-benar telah terjadi itu atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa konkret tersebut, dengan mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.

Proses selanjutnya adalah hakim akan menetapkan hukumnya terhadap peristiwa konkret tersebut, dimana jika peraturannya jelas, hakim hanya akan menerapkan ketentuan peraturan tersebut sesuai dengan peristiwa konkret yang terjadi. Akan tetapi, dalam hal peraturan sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*) dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan, atau dalam hal peraturannya tidak ada atau tidak mengaturnya, sehingga terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), maka hakim akan memutuskan suatu perkara berdasarkan metode-metode penemuan hukum yang dikenal selama ini.

Pada proses penemuan hukum oleh hakim, perlu dibedakan dua hal, yaitu mengenai tahap sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) dan tahap sesudah pengambilan putusan (*ex post*).⁹⁰

Dalam perspektif teori penemuan hukum, yang terjadi sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) disebut heuristika, yaitu proses mencari dan berpikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini berbagai argumentasi yang bersifat pro maupun kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang lain, kemudian ditentukan mana yang paling tepat. Adapun penemuan hukum yang terjadi

⁹⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Intepetasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 49.

sesudah putusan hakim (*ex post*) disebut legitimasi, di mana legitimasi itu berkenaan dengan pembenaran dari putusan yang sudah diambil. Pada tahap ini putusan diberi motivasi (pertimbangan) dari argumentasi secara substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu putusan hukum tidak bisa diterima oleh forum hukum, maka berarti putusan itu tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, premis-premis baru harus diajukan, dengan tetap berpegang pada penalaran *ex ante*, untuk meyakinkan forum hukum tersebut agar putusan itu dapat diterima.⁹¹

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Dalam hal ini, tidak menganut pandangan legisme yang hanya menerima undang-undang saja sebagai satu-satunya hukum dan sumber hukum. Sebaliknya di sini, hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum, yaitu undang-undang kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat.⁹²

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasanya hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk menemukan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas maka harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu agar nantinya dapat diterapkan dalam peristiwanya. Oleh karenanya, diperlukan ilmu bantu berupa metode penemuan hukum.

Tentang pembagian metode penemuan hukum ada beberapa pendapat, dengan mendasarkan pada pandangannya masing-masing. Sudikno Mertokusumo, secara garis besar membedakan metode penemuan hukum ini menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi (kontruksi hukum). Metode interpretasi, atau metode penafsiran digunakan dalam hal peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak atau kurang jelas, metode argumentasi digunakan dalam hal aturan perundang-undangannya tidak lengkap atau tidak ada, sedangkan metode konstruksi hukum atau eksposisi diperuntukkan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, yaitu dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.⁹³

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Adapun perbedaan antara dua metode tersebut menurut Achmad Ali adalah pada interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks. Sedangkan pada konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dimana hakim tidak

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Achmad Ali, *Menguak Tabir*, 165.

⁹³ *Ibid.*, 21.

lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁹⁴

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK KARENA POLIANDRI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Semarang⁹⁵

164. ⁹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung Tbk, 2002),

⁹⁵<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 12 Februari 2020.

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah diseluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul Awal 954 H. yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama yang dahulunya dikenal dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-Undang Belanda dengan keadaan istimewa di

Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda yang isinya adalah bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat-istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van De Berg (1845-1927), menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu menganut agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.⁹⁶

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan Cristian Snouck Hurgronje (1936-1957) yang memperkenalkan teori Receptie yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan

⁹⁶*Ibid.*

Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah SWT masih melindungi, undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bapak Basiron, seorang pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan Staatblaad tahun 1882.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 24 Ayat (1).

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.” Berdasarkan undang-undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya a. Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, b. dalam perkara tertentu, dan/atau c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

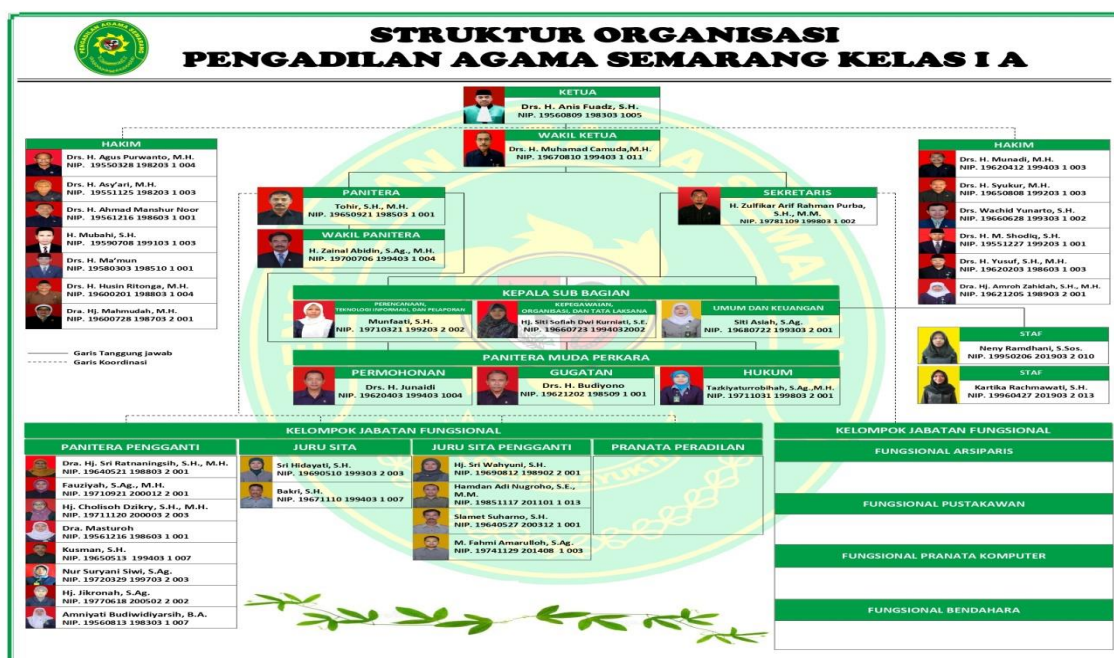
Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

- Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
- Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
- Fungsi lain-lain, yaitu penyuluhan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Bagan 3.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I A Semarang



Drs. H. Anis Fuadz, S.H. adalah Ketua Pengadilan Agama Semarang pada periode Oktober 2016 s/d sekarang. Adapun tugas dari Ketua Pengadilan Agama Semarang ialah merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Pembinaan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa secara organisatoris, Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. Dalam Ayat (2) ditambahkan bahwa Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. pasal 53 Ayat (4) UU Nomor 50 Tahun 2009 memperingatkan bahwa khusus pengawasan terhadap hakim, haruslah berupa

pengawasan yang bersifat fungsional berupa petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu. Artinya, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁹⁷

Sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang ialah Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal: merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bagan sebelah kiri terdapat Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti, merupakan sub organisasi fungsional peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan peradilan. Pada bagan bagian kanan, terdapat Hakim, Sekretaris, dan Staf. Sedangkan bagan bagian tengah yakni antara Panitera, Wakil Panitera, dan Sekretaris terdapat Kepala Sub Bagian yang terdiri dari: Sub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sub Bag. Umum dan Keuangan, dan Panitera Muda Perkara yang terdiri dari: Panmud Permohonan, Panmud Gugatan, dan Panmud Hukum.

Pada bagan bagian tengah, Sub Bagian adalah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi peradilan. Bagan ini merupakan sub organisasi yang tidak terkait dengan fungsi peradilan atau penegakan hukum. Namun, sub bagian mempunyai peran yang sangat besar dalam menyokong kelancaran organisasi. Sedangkan Panitera Muda Perkara merupakan pejabat struktur yang ikut membantu kelancaran tugas pejabat dalam menjalankan fungsi peradilan.

Dalam bagan terlihat bahwa jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan garis putus-putus. Artinya adalah hubungan antara pejabat fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural, tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi peradilan. Ketua dan wakil ketua hanya mempunyai hubungan struktural dengan panitera atau sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris atau eselon yang distrukturkan di bawah wakil panitera atau wakil sekretaris.⁹⁸ Sedangkan terhadap hakim, ketua dan wakil ketua mempunyai hubungan fungsional. Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi: mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat putusan atau penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani, serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

⁹⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 105.

⁹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 84.

4. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Semarang⁹⁹

- a. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Secara Manual
 - 1) Pemohon/Penggugat mengajukan permohonan kepada Petugas Meja 1.
 - 2) Petugas Meja 1 menerima dan memeriksa kelengkapan surat Permohonan.
 - 3) Jika kelengkapan surat Permohonan/surat Gugatan sudah lengkap, maka selanjutnya Petugas Meja 1 meng-entry identitas pihak/para pihak, posita, petitum permohonan dalam SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.
 - 4) Pemohon/Penggugat setelah membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama, maka Pemohon/Penggugat menghadap ke kasir Pengadilan Agama.
 - 5) Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas surat permohonan dari Pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara gugatan/permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP.
 - 6) Pemohon/Penggugat menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara.
- b. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Secara Online
 - 1) Pendaftaran Perkara

Pengguna Terdaftar (Pemohon/Penggugat Terdaftar) mendaftarkan perkara secara daring melalui aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut:

 - a) Memilih pengadilan yang berwenang;
 - b) Mendaftarkan surat kuasa khusus;
 - c) Membayar PNBPN pendaftaran surat kuasa;
 - d) Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara);
 - e) Menginput data para pihak;
 - f) Mengunggah dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;
 - g) Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM);
 - h) Melakukan pembayaran panjar biaya perkara.
 - 2) Pembayaran Panjar

⁹⁹<https://www.pa-semarang.go.id/images/SOP%20Penerimaan%20dan%20Pendaftaran%20Perkara.pdf>, diakses 12 Februari 2020.

Pengguna Terdaftar (Pemohon/Penggugat Terdaftar) membayar panjar biaya perkara ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Memperoleh taksiran panjar biaya perkara berupa e-SKUM yang disertai kode kode Akun Virtual saluran pembayaran elektronik;
- b) Melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara yang terdapat dalam e-SKUM;
- c) Menunggu konfirmasi otomatis dari sistem , melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi *e-Court*;
- d) Mendapatkan konfirmasi dari sistem dan memperoleh nomor perkara setelah diregister dalam SIPP;
- e) Menerima bukti telah melakukan pembayaran yang sudah dikonfirmasi sistem yang dapat dicetak.

3) Tata Cara Penomoran Perkara

Setelah Pengguna Terdaftar (Pemohon/Penggugat Terdaftar) mengajukan pendaftaran perkara dan membayar panjar biaya perkara secara elektronik, Panitera Muda Gugatan/Permohonan melakukan proses pengecekan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Melakukan login pada Aplikasi *e-Court* berdasarkan nama pengguna (*username*) dan kata kunci (*password*) petugas yang diberikan oleh Administrator SIPP;
- b) Mengecek pembayaran dan berkas yang diajukan oleh Pengguna Terdaftar (Pemohon/Penggugat Terdaftar) dalam menu pendaftaran perkara baru;
- c) Memilih klasifikasi perkara, dan
- d) Memberi status terverifikasi atau tidak terverifikasi terhadap pendaftaran perkara baru.

4) Bila terverifikasi Ketua membuat PMH melalui SIPP.

5) Panitera membuat Penunjukan Panitera Pengganti melalui SIPP.

6) Panitera membuat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti melalui SIPP.

7) Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang melalui SIPP.

8) Panggilan Para Pihak

Atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan relaas panggilan kepada para pihak melalui aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Melakukan *Login* pada Aplikasi *e-Court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh Administrator SIPP;
- b) Memeriksa jadwal sidang sebelum melakukan konfirmasi pengiriman *e-Pgl*;

- c) Mengunggah relaas panggilan yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas ke dalam aplikasi *e-Court*;
- d) Mengirimkan *e-Pgl* kepada para pihak melalui domisili elektronik.
Panggilan untuk Termohon/Tergugat untuk sidang pertama dilakukan dengan panggilan biasa.

9) Sidang Pertama

Bila para pihak hadir;

- a) Pengguna Terdaftar (Pemohon/Penggugat Terdaftar) harus menyerahkan surat-surat asli berupa surat kuasa, surat gugatan/surat permohonan, dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- b) Kepada Termohon/Tergugat Ketua Majelis menawarkan untuk beracara secara elektronik.
- c) Bila tidak setuju maka selanjutnya dilakukan acara biasa.
- d) Bila setuju Termohon/Tergugat melakukan pendaftaran untuk beracara secara elektronik jika telah terdaftar, panggilan/pemberitahuan dan jawab menjawab secara elektronik.

10) Jawab Menjawab

Para pihak dapat mengirimkan Jawaban, Replik, Duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Melakukan *login* sesuai nama pengguna dan kata kunci yang dimiliki;
- b) Mengunggah dokumen Jawaban, Replik, Duplik sesuai dengan tahapan persidangan yang dijalani paling lambat satu hari sebelum hari yang telah ditetapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pihak tidak mengunggah dokumen dimaksud, maka dianggap tidak menggunakan haknya;
- c) Aplikasi *e-Court* akan mengirimkan dokumen Jawaban, Replik, Duplik secara elektronik kepada pihak Pemohon/Penggugat atau Termohon/Tergugat melalui domisili elektroniknya sekaligus mengirimkan pemberitahuan jadwal sidang sesuai dengan agenda persidangan;
- d) Para pihak akan mendapatkan notifikasi bahwa dokumen Jawaban, Replik, Duplik telah terkirim ke domisili elektronik yang dituju Pengiriman salinan Putusan/Penetapan dilakukan oleh Panitera melalui aplikasi *e-Court* dalam bentuk tautan (*link*) yang dapat digunakan untuk membuka dokumen tersebut.

11) Pembuktian

Sidang pembuktian dilakukan dengan acara biasa.

12) Kesimpulan

Kesimpulan para pihak dilakukan secara elektronik sebagaimana jawab menjawab diatas.

13) Sidang Putusan

Dilakukan dengan acara biasa.

14) Pemberitahuan Putusan

Bila pada sidang putusan, bila ada para pihak tidak hadir dilakukan pemberitahuan secara elektronik sebagaimana tata cara dalam pemanggilan dan pemberitahuan.

B. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak Karena Poliandri di Pengadilan Agama Semarang

Prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang sama halnya dengan prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama lainnya yakni dengan mengacu pada Pasal 66 sampai Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁰⁰

1. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak Karena Poliandri di Pengadilan Agama Semarang

Prosedur penyelesaian perkara cerai talak mengacu pada Pasal 66 sampai Pasal 72 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

a. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau kuasanya:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 RBg jo. Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009);
- 2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 RBg jo. Pasal 58 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009);
- 3) Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:

¹⁰⁰Husin Ritonga Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara, tanggal 30 Januari 2020.

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009);
 - 2) Apabila Termohon meninggalkan yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009);
 - 3) Apabila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009);
 - 4) Apabila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009).
- c. Permohonan tersebut memuat:
- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
- d. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 Ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009).
- e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 Ayat (4) HIR, 145 Ayat (4) RBg jo. Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 RBg, Pasal 60 C Ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

2. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak Karena Poliandri di Pengadilan Agama Semarang

Proses penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang mengacu pada Pasal 82 sampai Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

- a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
- c. 1) Tahapan Persidangan:
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian, dan mengajukan gugatan rekonsvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 RBg).
- 2) Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:
 - 1) Permohonan dikabulkan. Apabila Pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - 2) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - 3) Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- d. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
 - 1) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
 - 2) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
 - 3) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 Ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009).

- e. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009).

C. Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Talak Karena Poliandri di Pengadilan Agama Semarang

1. Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistemik harus melalui beberapa tahap berikut ini:

- a. Melakukan Perdamaian

Pada sidang upaya perdamaian, inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat/tergugat atau pemohon/termohon. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak.¹⁰¹ Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil maka sidang dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

- b. Pembacaan Surat Gugatan

Pada tahap ini, pihak penggugat/pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan (objek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

- c. Jawaban Tergugat/Termohon

Pihak tergugat/termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat/pemohon melalui majelis hakim dalam persidangannya.

- d. Replik dari Penggugat/Pemohon

Penggugat/pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya atau permohonannya yang disangkal oleh tergugat/termohon dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan tergugat/termohon.

- e. Duplik dari Tergugat/Termohon

Tergugat/Termohon menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.

- f. Tahap Pembuktian

¹⁰¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 85.

Penggugat/pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian juga tergugat/termohon mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

g. Tahap Kesimpulan

Masing-masing pihak baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon, mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

h. Tahap Putusan

Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan sebagai akhir persengketaan.¹⁰²

Dalam perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang yang terdapat dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg, mekanisme pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah sebagai berikut:¹⁰³

a. Sidang Pertama

Pada saat persidangan pertama, sangat dimungkinkan terdapat para pihak yang belum hadir sesuai dengan relaas panggilan sidang yang telah disampaikan pihak Pengadilan Agama setempat melalui juru sita Pengadilan Agama setempat. Dalam persidangan pertama, dapat dimungkinkan pihak penggugat atau pemohon tidak dapat hadir atau sebaliknya, pihak tergugat atau termohon yang tidak dapat hadir, dapat juga keduanya hadir atau sebaliknya, keduanya tidak dapat hadir. Dalam hal tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan beberapa hal dan kemungkinan untuk menunda sidang tersebut, dan juga memerintahkan panitera pengganti untuk meminta juru sita menyampaikan relaas panggilan sidang kepada pihak yang tidak dapat hadir.¹⁰⁴

Dalam perkara ini, Pemohon hadir dan Termohon maupun wakil atau kuasa hukumnya tidak dapat hadir pada sidang pertama, sehingga Majelis Hakim menunda sidang dan memerintahkan panitera pengganti untuk meminta juru sita menyampaikan relaas panggilan sidang kepada pihak Termohon supaya hadir dalam persidangan selanjutnya. Namun saat persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

b. Upaya Perdamaian

Maksud dari perdamaian di sini adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri

¹⁰² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 147.

¹⁰³ Husin Ritonga Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara, tanggal 30 Januari 2020.

¹⁰⁴ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet 1, 122.

suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.¹⁰⁵

Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan maka Ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi, sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Tingkat Banding.¹⁰⁶

Dalam perkara ini, dikarenakan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR. Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c. Pembacaan Surat Gugatan atau Permohonan

Dalam perkara ini, dikarenakan pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka secara otomatis upaya perdamaian tidak berhasil dikarenakan mediasi tidak dapat dilakukan. Sehingga guna menerapkan asas peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka sidang dilanjutkan pada tahap pembacaan surat gugatan atau permohonan.

Salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut dicantumkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan agar para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan ada kepastian tentang: bagaimana tata cara mempertahankan hak, kapan dapat memperoleh hak tersebut, serta berapa biaya yang harus dikeluarkan guna memperoleh hak tersebut.¹⁰⁷

Pengertian “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, dan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya

¹⁰⁵Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum*, 150.

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷ Sunarto, *Peran Aktif*, 29.

perkara dapat dipikul oleh rakyat, namun di dalam penyelesaian perkara tersebut tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dalam beracara dimuka pengadilan akan semakin baik. Bila terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang berwayuh arti (*dubious*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum.¹⁰⁸

Pengertian asas “cepat” berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan yang meliputi pula proses pembuatan berita acara persidangan dan penyerahan salinan putusan kepada para pihak serta meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas.¹⁰⁹

Pengadilan berkewajiban untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan cara meningkatkan profesionalisme aparatur pengadilan serta tetap memberi kesempatan pada pihak yang tidak mampu ekonominya untuk mempertahankan haknya di pengadilan dengan beracara secara prodeo/cuma-Cuma dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada setiap pengadilan telah dibentuk pos bantuan hukum (posbakum) yang disediakan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu dan biaya perkara bagi yang tidak mampu akan ditanggung oleh negara.¹¹⁰

Pada tahap pembacaan gugatan atau permohonan, maka pihak Penggugat/Pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan atau permohonan itulah yang menjadi objek pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan atau permohonan.

Pembacaan gugatan/permohonan dibacakan oleh Penggugat/Pemohon dan/atau kuasanya, jika Penggugat/Pemohon tidak bisa baca tulis, maka gugatan/permohonan dapat dibacakan oleh Ketua Majelis atau yang mewakilinya. Pada tahap pembacaan gugatan/permohonan ini terdapat beberapa kemungkinan dari Penggugat/Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1) Mencabut gugatan/permohonan

Gugatan/permohonan dapat dicabut secara sepihak, jika perkara belum diperiksa. Tetapi, jika perkara telah diperiksa dan Tergugat/Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat/Termohon. Apabila perkara belum ditetapkan hari sidangnya maka

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), cet 1, 36.

¹⁰⁹ Sunarto, *Peran Aktif*, 30.

¹¹⁰ *Ibid.*, 34.

gugatan/permohonan dapat dicabut dengan surat, dapat pula dilakukan dengan lisan di muka sidang dan dicatat di Berita Acara Persidangan.

2) Mengubah gugatan/permohonan

Jika hakim melihat surat gugatan/permohonan yang dibuat belum sempurna, hakim dibenarkan memberikan penerangan kepada Penggugat/Pemohon untuk mengubah dan menyempurnakan gugatannya/permohonannya sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil yang menyebabkan pokok gugatan/permohonan menjadi lain dan/atau menambah tuntutan.

3) Mempertahankan gugatan/permohonan

Jika Penggugat/Pemohon tetap mempertahankan gugatan/permohonannya, maka sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu replik-duplik (tahap jawab-menjawab), baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak.

Dalam perkara ini, hakim merasa bahwa tidak ada kekurangan dalam surat permohonan sehingga Pemohon tidak perlu mengubah dan menyempurnakan permohonannya. Selanjutnya Pemohon meneliti ulang seluruh materi (dalil gugat dan petitum), karena dirasa sudah benar dan lengkap, maka pembacaan surat permohonan dibacakan secara langsung oleh Pemohon di muka sidang. Dan dalam hal ini, Pemohon tetap mempertahankan gugatan/permohonannya. Maka sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu replik-duplik (tahap jawab-menjawab).

d. Tahap Replik-Duplik (Tahap Jawab-Menjawab)

Terhadap dalil gugat/permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon, maka pihak Tergugat/Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat/Pemohon melalui Majelis Hakim di muka sidang.

Hal yang perlu diingat dalam tahap replik-duplik ialah:¹¹¹

- 1) Tergugat/Termohon selalu mempunyai hak bicara terakhir;
- 2) Pertanyaan hakim kepada para pihak hendaklah terarah, sesuai dengan hukum, begitu juga replik dan duplik dari para pihak;
- 3) Semua jawaban atau pertanyaan dari hakim harus melalui dan izin dari Ketua Majelis;
- 4) Pertanyaan hakim kepada pihak, yang bersifat umum atau *policy* arahnya sidang, selalu oleh Hakim Ketua Majelis.

Pada tahap ini ada beberapa kemungkinan dari Tergugat/Termohon, yaitu:¹¹²

1) Eksepsi (tangkisan)

Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan yang tidak mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan suatu cara

¹¹¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 85-86.

¹¹² *Ibid.*

agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak. Eksepsi secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

a) Eksepsi prosedural, yaitu eksepsi yang berdasar Hukum Acara (hukum proses), meliputi:

- (1) Eksepsi tidak berwenang secara absolut (pengadilan agama tidak berwenang memeriksa perkara tersebut);
- (2) Eksepsi tidak berwenang secara relatif (peradilan yang dituju tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, tetapi wewenang peradilan agama di wilayah lain);
- (3) Eksepsi *nebis in idem* (persoalan yang sama telah pernah diputus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau perkara tersebut masih dalam taraf banding atau kasasi);
- (4) Eksepsi diskualifikator (bahwa penggugat tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak atau mengajukan gugatan, atau Penggugat salah menentukan Tergugat, baik mengenai orangnya dan/atau identitasnya);
- (5) Eksepsi *abscurlibel* (gugatan kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami, atau bertentangan).

b) Eksepsi materil, yaitu eksepsi yang berdasar hukum materil, yang meliputi:

- (1) Eksepsi *dilatoir* (eksepsi yang menyatakan, bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya oleh karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran).
- (2) Eksepsi *peremtoir* (eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya oleh karena gugatan yang diajukan telah kadaluwarsa (lampau waktu)).

2) Mengaku bulat-bulat.

3) Membantah.

4) Membantah dengan *clausa* (syarat).

5) *Referte* (jawaban berbelit-belit).

6) Rekovenssi (mengajukan gugat balik terhadap Penggugat/Pemohon).

Dalam perkara ini, dikarenakan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berarti ia tidak menggunakan haknya untuk membela diri serta mengajukan segala kepentingannya terhadap Pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangannya. Maka perkara ini dilanjutkan pada tahap pembuktian.

e. Pembuktian

Tahap selanjutnya adalah pembuktian. Menurut Abdul Manan dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti yang sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.¹¹³ Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.¹¹⁴

Dari pengertian tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Alat bukti yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diakui, seperti tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:¹¹⁵

1) Alat bukti surat (tertulis)

Surat-surat akta yaitu yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dimuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian, seperti surat persetujuan jual beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.

Surat-surat akta dikategorikan kepada akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di muka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai bukti. Yang dimaksud pejabat umum di atas adalah notaris, juru sita, hakim, panitera, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi, semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Adapun kekuatan bukti akta di bawah tangan ini tidak seperti akta autentik yakni bukan merupakan bukti yang sempurna. Akan tetapi, akta di bawah tangan ini diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka naiklah derajat dari tidak merupakan bukti yang sempurna menjadi bukti yang sempurna.

2) Alat bukti saksi

¹¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 227.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata*, 109-115.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Keterangan saksi itu harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri, tidak diwakilkan, serta tidak boleh dibuat secara tertulis.

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali bila ditentukan lain oleh undang-undang. Orang yang sama sekali tidak boleh didengar persaksiannya, yaitu keluarga karena kelahiran atau keluarga karena perkawinan dalam turunan ke atas dan ke bawah dari salah satu pihak, istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai, anak-anak yang usianya belum 15 (lima belas) tahun dan orang gila meskipun terkadang ingatannya terang. Adapun orang-orang yang tidak boleh mengundurkan diri dari memberikan kesaksiannya, yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak, keluarga dari istri atau suami salah satu pihak dalam kekeluargaan garis lurus ke atas dan ke bawah atau di garis samping sehingga derajat kedua dan orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Adapun kewajiban seorang saksi, yakni kewajiban menghadap, kewajiban untuk bersumpah, dan kewajiban memberikan keterangan.

Walaupun saksi sudah memberikan keterangan di persidangan di muka hakim, hakim tidak dapat dipaksa untuk mempercayai saksi, sebab mungkin saja suatu saksi palsu. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dan memperhatikan benar-benar, apakah ada kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya atau adakah kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan isi perkara yang disengketakan, bagaimana sifat-sifat dan adat istiadat saksi, ada hubungan apakah antara saksi dengan yang disaksikan. Oleh karena itu, ada suatu asas yang berbunyi: *unus testis nullus testis* satu alat bukti bukanlah alat bukti, sehingga seorang saksi bukanlah saksi, kecuali jika dikuatkan dengan alat bukti lain, mislanya ditambah dengan pengakuan tergugat atau sumpah. Maksudnya, keterangan seorang saksi saja tanpa dikuatkan alat-alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup.

Adapun macam-macam saksi terbagi kepada saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang umum, sedangkan saksi ahli yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan khusus tentang sesuatu persoalan, seperti dokter, seorang *dactyloscopy* (ahli sidik jari), ahli forensik, ahli bahasa, dan seterusnya.

3) Persangkaan (dugaan)

Ada 2 (dua) macam persangkaan yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang-undang (*preasumption juris*) dan persangkaan yang didasarkan atas suatu kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*preasumption facti*). Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Sedangkan, persangkaan yang didasarkan atas suatu kesimpulan yang ditarik oleh hakim adalah suatu persangkaan-persangkaan yang didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada, yang dilihat oleh hakim dalam proses persidangan, sehingga tersusunlah suatu kesimpulan persangkaan-persangkaan.

Hakim tidak boleh sembarangan dalam menarik kesimpulan dari adanya berbagai peristiwa. Hakim harus benar-benar berhati-hati, karenanya persangkaan hanya dapat dibenarkan bila persangkaan itu timbul dari adanya kesaksian, surat-surat, pengakuan dari salah satu pihak. Atau dalam istilah Pasal 311 HIR, adanya isyarat atau petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh saksi-saksi, surat-surat, pemeriksaan sendiri, biarpun di luar pengadilan.

4) Pengakuan

Pengakuan suatu pihak dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, ditinjau dari segi acara pelaksanaannya adalah pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan di muka hakim dan ada yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke behententis*) ialah suatu pernyataan tegas oleh seseorang di muka sidang pengadilan, yang membenarkan seluruh dakwaan lawan, walau hanya satu atau lebih dari satu, hak-hak atau hubungan yang didakwakan. Pengakuan di muka hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun pertolongan kuasanya, merupakan bukti yang cukup dan mudah, artinya hakim harus menerima pengakuan itu sebagai alat bukti yang cukup.

Pengakuan di luar persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan lawannya. Kekuatan pembuktian dari pengakuan di luar sidang adalah sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau sama sekali tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian, atau juga dapat mengambil sikap tengah, yang dianggap sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang dapat disempurnakan secara tambahan dengan alat bukti lain. Pengakuan suatu pihak ditinjau dari segi isi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam:

- a) Pengakuan murni (*aveupur et simple*) ialah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan, seperti penggugat seharga Rp. 10 juta, lalu diakui sepenuhnya oleh tergugat bahwa ia telah menjual sebidang tanah Rp. 10 juta.

- b) Pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekenenis areu qualifie*) ialah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Seperti, penggugat menyatakan bahwa tergugat mempunyai utang kepada penggugat Rp. 10 juta, lain diakui oleh tergugat akan utangnya itu, akan tetapi bukan Rp. 10 juta, tetapi hanya Rp. 5 juta.
- c) Pengakuan dengan *clausule* (*geclausu leered behentenis, aveu complexe*) adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan. Contoh, penggugat menyatakan bahwa tergugat mempunyai utang kepada penggugat sebesar Rp. 10 juta, kemudian diakui oleh tergugat, tetapi utang itu telah dibayar lunas kepada penggugat.

Sehubungan dengan adanya larangan membagi-bagi pengakuan, maka hakim tidak boleh memisah-misahkan pengakuan murni, sebab tidak ada alasan bagi hakim untuk memisah-misahkannya. Demikian pula pengakuan kualifikasi dan pengakuan *clausule*, hakim harus menerima bulat-bulat sepenuhnya dengan tidak memisahkan keterangan-keterangan tambahannya itu, sebab jika dipisahkan akan merugikan salah satu pihak.

- a) Hal ini diakui oleh T (pengakuan pertama).
- b) Tapi telah dibayar lunas (keterangan tambahan/*clausule*)

Dalam hal ini, bila hakim memisahkan antara pengakuan pertama (huruf a) dengan keterangan tambahan (huruf b), maka jelas T akan dirugikan oleh hakim.

5) Sumpah.

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada umumnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Sumpah menurut pembagiannya dibagi kepada 2 (dua) jenis, yaitu sumpah pelengkap atau tambahan (*suplatoir*), dan sumpah penentu atau pemutus (*decisoir*). Sumpah *suplatoir* adalah suatu sumpah yang diberatkan oleh hakim atas pendakwa atau terdakwa guna menyempurnakan alat-alat bukti tersebut, ditambah dengan sumpah tersebut, memperoleh daya bukti cukup untuk dijadikan dasar putusan. Sedangkan, sumpah *decisoir* adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak lawannya, dengan maksud untuk menyelesaikan perkara.

Dalam perkara ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a) Surat:

- (1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.33.06/Pw.01/81/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);
- b) Saksi:
- (1) SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- (a) Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
 - (b) Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - (c) Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
 - (d) Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon ;
 - (e) Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - (f) Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi pertengkaran ;
 - (g) Bahwa pada tahun 2016 saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran ;
 - (h) Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain bahkan telah mempunyai satu orang anak ;
 - (i) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1,½ tahun yang lalu hingga sekarang ;
 - (j) Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi Pemohon ke rumah orang tuanya di Pemalang ;
 - (k) Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi ;
 - (l) Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - (m) Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- (2) SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- (a) Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
 - (b) Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon ;
 - (c) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon ;
 - (d) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
 - (e) Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran ;
 - (f) Bahwa saksi pernah melihat mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;

- (g) Bahwa setahu saksi penyebabnya, karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan telah mempunyai 1 orang anak hasil hubungan dengan laki-laki tersebut ;
- (h) Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1,½ tahun hingga sekarang ;
- (i) Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi ;
- (j) Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun belum berhasil ;
- (k) Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Dikarenakan pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon maka menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit perceraian dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dibebani wajib bukti seperti yang telah diuraikan di atas.

f. Kesimpulan

Selanjutnya, tahap kesimpulan. Pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung.

Dalam perkara ini, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah mencukupkannya dan bersedia mengucapkan sumpah tambahan dalam perkara ini kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan selanjutnya mohon putusan oleh majelis hakim.

g. Putusan/Penetapan Hakim

Tahapan terakhir, yaitu putusan/penetapan hakim. Tahap ini diawali dengan musyawarah Majelis Hakim, dilaksanakan secara rahasia. Jika ada 2 (dua) orang hakim anggota Majelis Hakim berpendapat sama, maka hakim yang kalah suara itu, harus menerima pendapat yang sama itu. Jika terjadi masing-masing anggota hakim itu berbeda pendapat satu sama lain, maka permasalahan itu dapat diselesaikan dengan alternatif: Persoalan tersebut dibawa ke Sidang Pleno Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim karena jabatannya dapat menggunakan hak vetonya dalam menyelesaikan perkara tersebut, dengan catatan pendapat hakim yang tidak sepakat dicatat di dalam buku catatan hakim yang telah disediakan. Setelah itu baru dijadwalkan sidang pembacaan putusan. Setelah putusan selesai dibacakan, Majelis Hakim akan menanyakan kepada para pihak, apakah menerima putusan atau tidak. Bagi yang tidak menerima mempunyai hak untuk banding.

Berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa produk peradilan agama terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu putusan dan penetapan.

1) Putusan

a) Pengertian Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.¹¹⁶

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.” Sedangkan menurut A. Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).¹¹⁷

Kemudian Gemala Dewi memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian putusan, putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan Agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.¹¹⁸ Jadi pengertian putusan dapat disimpulkan merupakan pernyataan hakim yang tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

b) Macam-macam Putusan¹¹⁹

Dilihat dari segi fungsinya, putusan hakim terdiri atas:

- (1) Putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu putusan yang mengakhiri di persidangan dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan.
- (2) Putusan sela (*tussen vonnis*), yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan.
- (3) Putusan serta-merta, yaitu putusan pengadilan agama yang pada putusan tersebut oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara dilakukan upaya hukum baik *verzet*, banding maupun kasasi dan memakan waktu relatif lama, lalu ada suatu gugatan dari salah satu pihak, agar putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan agama dilaksanakan terlebih dahulu, tidak lagi menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹¹⁶ A. Raihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203.

¹¹⁷ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara*, 245.

¹¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Acara*, 148.

¹¹⁹ Mukti Arto, *Praktik Perkara pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet IV, 252.

Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- (1) Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir.
- (2) Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan
- (3) Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan dibagi 4 (empat) macam, yaitu:

- (1) Putusan tidak menerima gugatan penggugat, yaitu gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).
- (2) Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti (putusan negatif).
- (3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif).
- (4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat (putusan positif).

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- (1) Diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi “Menetapkan....” Putusan diklatoir terjadi dalam putusan: Permohonan talak, Gugat cerai karena perjanjian ta’lik talak, Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya, Penetapan ahli waris yang sah, Penetapan adanya harta bersama, Perkara-perkara valunter, dan seterusnya.
- (2) Putusan konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukm tersebut. Amar putusan konstitutif berbunyi “Menyatakan....” dan putusan konstitutif terdapat pada putusan-putusan: Putusan gugur, ditolak, dan putusan tidak

diterima, Gugatan cerai bukan karena ta'lik talak, Putusan verstek, Putusan pembatalan perkawinan, dan seterusnya.

- (3) Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Amar putusan kondemnatoir berbunyi “Menghukum....”Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yang bila ter hukum tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*) oleh pengadilan agama yang memutusnya. Amar putusan kondemnatoir yang diterapkan di pengadilan agama antara lain: Penyerahan pembagian harta bersama, Penyerahan hak nafkah iddah, mut'ah, Penyerahan hak biaya alimentasi anak, dan sebagainya.

c) Bentuk dan Isi Putusan

Bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, bentuk dan isi putusan pengadilan agama secara singkat adalah sebagai berikut:¹²⁰

- (1) Bagian kepala putusan;
- (2) Nama pengadilan agama yang memutus dan jenis perkara;
- (3) Identitas para pihak;
- (4) Duduk perkaranya (posita);
- (5) Tentang pertimbangan hukum;
- (6) Dasar hukum;
- (7) Diktum atau amar putusan;
- (8) Bagian kaki putusan; dan
- (9) Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.

d) Kekuatan Hukum Putusan

Putusan pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu sebagai berikut:¹²¹

- (1) Kekuatan mengikat (*bindende kracht*)

Artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan terlibat dalam perkara itu.

- (2) Kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*)

Artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran suatu yang termuat didalamnya.

- (3) Kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*)

¹²⁰ A. Raihan Rasyid, *Hukum Acara*, 204.

¹²¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama*, 177.

Artinya kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

2) Penetapan

a) Pengertian Penetapan

Dalam Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan.¹²² Penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).

b) Bentuk dan Isi Penetapan

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan putusan, yang membedakannya adalah sebagai berikut:

- (1) Hanya mengandung satu pihak yang berperkara.
- (2) Tidak ada kata “berlawanan dengan” seperti pada putusan.
- (3) Tidak ada kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon.
- (4) Amarnya hanya berbentuk *declaratoir* atau konstitutif.
- (5) Menggunakan kata “menetapkan”.
- (6) Biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon.
- (7) Tidak ada *reconventive* dan intervensi.
- (8) Tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi.

c) Kekuatan Hukum Penetapan

Putusan volunter hanya mempunyai kekuatan hukum sepihak, pihak lain tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti kebenaran hal-hal yang dideklarasikan dalam putusan volunter, karena itu pula maka putusan volunter tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian.

Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkara ini, setelah majelis hakim bermusyawarah terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim telah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang cukup alasan dalam posita gugatan menurut

¹²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 339.

hukum pembuktian dan juga telah memiliki dasar hukum yang jelas berdasar pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan, hukum Islam, maupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Oleh karenanya, dalam perkara ini majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Semarang yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada dalam naungan Mahkamah Agung, ialah suatu badan peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang tidak terlepas dari prosedur penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama pada umumnya, yakni dengan mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Proses penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang diawali dari pendaftaran perkara ke pengadilan oleh Pemohon (suami) atau kuasanya dengan membawa surat permohonan dan melampirkan persyaratan-persyaratan yang lengkap. Setelah panitera pengadilan agama menerima surat permohonan, maka panitera akan meneliti apakah surat permohonan tersebut sudah benar dan jelas, apakah perkara tersebut merupakan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut Pengadilan Agama Semarang atau bukan.

Selanjutnya, apabila semua persyaratan lengkap, Pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya perkara sesuai yang tertera pada SKUM kepada kasir. Kasir menerima panjar biaya perkara dan membukukannya, menandatangani, memberi nomor perkara, dan tanda tangan serta keterangan lunas dari SKUM. Surat permohonan yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Semarang, kemudian diberi nomor perkara dan didaftarkan pada buku register perkara dan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, surat permohonan tersebut harus sudah diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk dilakukan Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Dalam perkara cerai talak Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut ialah Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Shodiq, S.H. dan Drs. H. Ahmad Manshur Noor masing-masing sebagai Hakim Anggota. Setelah Ketua Majelis (Drs. H. Husin Ritonga, M.H.) menerima PMH dan berkas perkara yang bersangkutan dari Ketua Pengadilan, selanjutnya Majelis Hakim mempelajari berkas perkara tersebut, dan dalam waktu satu minggu setelah mempelajari berkas tersebut, Majelis Hakim membuat Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Panitera Sidang, dalam perkara ini, Drs. H. Budiyono sebagai Panitera Pengganti. Selanjutnya, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan.

Dalam sidang pertama, hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak (Pemohon dan Termohon). Dikarenakan pihak Termohon yang sudah dipanggil secara patut dan resmi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, maka dalam sidang pertama hakim memutus perkara secara verstek, menunda persidangan selama satu minggu ke depan dan memerintahkan Juru Sita memanggil kembali pihak Termohon untuk menghadiri persidangan selanjutnya. Namun pada hari sidang kedua, Termohon yang sudah dipanggil secara patut dan resmi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya adalah pembacaan surat permohonan oleh Pemohon. Pemohon menguraikan dalil-dalil konkret yang dijadikan alasan olehnya untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Semarang. Pemohon mempertahankan gugatan/permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon (istrinya). Dikarenakan pihak Termohon atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, maka tidak ada tahap replik duplik diantara keduanya. Maka pada sidang berikutnya adalah pembuktian. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan bukti Surat dan 2 (dua) orang saksi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Selanjutnya adalah tahap kesimpulan, yang mana dalam perkara ini Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon (istrinya), dan selanjutnya mohon putusan oleh majelis hakim. Pada tahap akhir yakni putusan atau penetapan hakim. Namun sebelum menjatuhkan putusan atau penetapannya, maka majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu guna mempertimbangkan apakah perkara tersebut akan dikabulkan atau ditolak.

Dalam perkara ini, hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Dalam amar putusannya, hakim mengadili : Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; Memberi izin

kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya, Pengadilan Agama Semarang menentukan hari sidang pelaksanaan ikrar talak. Penyaksian ikrar talak dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya dihadapan Majelis Hakim. Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai bukti bahwa telah terjadinya perceraian diantara keduanya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak oleh Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK KARENA POLIANDRI DALAM PUTUSAN NOMOR 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg

A. Alasan Pengajuan Permohonan Cerai Talak dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg

Dalam ranah hukum perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian. Hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertokusumo suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan karena masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan itu terbukti berdasarkan atas suatu hak, pasti dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294/K.Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.¹²³

Bersandar pada pendapat Sudikno Mertokusumo dan Yurisprudensi Mahkamah Agung seperti yang diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa urgensi atau pentingnya alasan-alasan hukum perceraian, yaitu pertama alasan-alasan hukum adalah kepentingan hukum yang merupakan syarat diterimanya tuntutan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Kedua, hakim di pengadilan akan mengabulkan tuntutan perceraian hanya jika fakta-fakta hukum yang diajukan oleh suami istri dipersidangan mempunyai nilai pembuktian menurut hukum. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh dan memeriksa bukti-bukti yang cukup untuk memutus sengketa atau perkara perceraian, maka hakim pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada suami istri untuk memberikan pendapatnya.¹²⁴

Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg merupakan sampel perkara cerai talak karena poliandri pada Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. Perkara tersebut telah diputus pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Shodiq, S.H. dan Drs. H. Ahmad Manshur Noor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Budiyo sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Adapun yang menjadi alasan pemohon atau dalil pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak adalah, bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara sirri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut.

¹²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 53.

¹²⁴ Muhammad Syaifuddin, Et. Al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 180.

Selain alasan tersebut, Termohon juga sudah tidak memiliki iktikad baik lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Hal tersebut yang menjadikan alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon. Pemohon beranggapan bahwa rumah tangganya sudah terpecah belah karena kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Semarang untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg

Pengadilan yang sehari-harinya bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara dari berbagai kasus yang diajukan dan tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut. Dalam kondisi seperti ini, hakim harus menerapkan hukum dan keadilan. Hakim menerapkan dua macam aturan, yaitu:¹²⁵

1. Hukum formal, yaitu ketentuan yang mengatur tata cara memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam perkara perdata, hakim wajib mematuhi ketentuan hukum acara perdata yang ada dalam HIR/RBg dan ketentuan hukum acara lainnya, sebab dalam menjalankan hukum acara, yakni dalam rangka mewujudkan keadilan prosedural. Keadilan prosedural tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum. Dalam kepastian hukum, maka keadilan akan terjamin. Misalnya mendengar kedua belah pihak di persidangan sesuai asas *audi et alteram partem*, memberikan hak seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalinya secara berimbang. Dalam mengajukan upaya hukum ada tenggang waktu yang tidak boleh dilewati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum demi keadilan.
2. Hukum materiel, yaitu hukum yang mengatur akibat hukum dari suatu hubungan hukum atau suatu peristiwa hukum. Hukum materiel dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substansial, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat. Hakim dalam menerapkan hukum materiel dibekali pengetahuan ilmu hukum seperti interpretasi, argumentasi analogi, *a contrario* dan penghalusan hukum, teori-teori hukum, dan filsafat hukum. Hakim tidak boleh gegabah menyimpangi ketentuan hukum formal meskipun dengan alasan demi keadilan, sebab keadilan itu sangat relatif sifatnya.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dalam kegiatan mengadili, Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg memberikan kriteria bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan hakim dilarang mengadili apa yang tidak dituntut atau memberi putusan lebih dari yang dituntut.

¹²⁵ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum*, 135-136.

Dalam perkara perceraian yang terdapat dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/PA.Smg, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Selama proses persidangan berlangsung, Termohon tidak pernah hadir sekali pun dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Putusan verstek merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara *contradictoir* dan prinsip *audi et alteram partem* sebagai akibat ketidakhadiran Tergugat/Termohon atau alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek, Tergugat/Termohon dianggap ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini Tergugat/Termohon dianggap mengakui secara sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugat/permohonan Penggugat/Pemohon (*full confension*). Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dalam hal Tergugat/Termohon tidak hadir pada sidang pertama. Menurut SEMA Nomor 9 Tahun 1964, pengertian hari sidang pertama (*tendage dienende*) bisa juga diartikan pada hari sidang kedua dan sebagainya (*ten dagedat zaak client*).¹²⁶

Putusan verstek diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 196-197 HIR, Pasal 148-153 RBg dan 207-208 RBg, UU Nomor 20 Tahun 1947, dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:¹²⁷

- a. Tergugat/Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;
 - b. Tergugat/Termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah;
 - c. Tergugat/Termohon tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan;
 - d. Penggugat/Pemohon hadir dipersidangan; dan
 - e. Penggugat/Pemohon mohon keputusan.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

Adapun dalam menjatuhkan putusan talak satu raj'i yang terdapat pada Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg, majelis hakim telah mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

¹²⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama*, 165.

¹²⁷ *Ibid.*, 175-176.

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;
- b. Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR;
- c. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- d. Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan sudah dikaruniai satu orang anak dan sejak tahun 2016 sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, oleh karena itu yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;
- e. Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon maka menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit perceraian dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dibebani wajib bukti;
- f. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;
- g. Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti surat, maka bukti P dapat diterima dalam perkara ini;

- h. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- i. Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri mengenai perselisihan dan pertengkaran karena sejak awal tahun 2016 Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai 1 orang anak, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - 2) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak awal tahun 2016 Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
 - 3) Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi;
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- m. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon;
- n. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Selain pertimbangan hukum di atas, berdasarkan keterangan seorang Hakim Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara ini, yakni Bapak Drs. Husin Ritonga, beliau mengatakan bahwa dalam memutus perkara perceraian biasanya hakim menggunakan pertimbangan untuk mencegah kemadharatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, juga harus memperhatikan dua hal yakni maslahat dan mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum Islam (ushul fiqh) yang berbunyi:

(Dar'ul mafasid awla min jalbil mashalih) **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ**

Kaidah ini mengandung arti bahwa menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.¹²⁸

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perkara perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon diakibatkan karena Pemohon mendapati Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara sirri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut. Hal tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus di antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perkawinan secara sirri memang tidak bisa dibuktikan secara nyata menggunakan alat bukti tertulis seperti surat dan lain sebagainya. Dikarenakan perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat kawin namun tidak di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak.¹²⁹ Sedangkan sahnya perkawinan dalam perspektif hukum konvensional adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pengadilan agama yang berwenang tidak dapat melakukan pembatalan perkawinan antara Termohon dengan suami sirrinya guna menyelamatkan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Karena perkawinan sirri adalah perkawinan di bawah tangan, sehingga pengadilan tidak dapat memutus perkara perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun pengadilan dapat memberikan itsbat nikah (pengesahan perkawinan) apabila pasangan suami istri tersebut mengajukan permohonan kepada

¹²⁸Husin Ritonga, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara, tanggal 30 Januari 2020.

¹²⁹*Ibid.*

pengadilan agama sesuai wilayah domisilinya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan.¹³⁰

Perceraian merupakan perkara halal namun dibenci Allah. Oleh karena itu, maka sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit perceraian dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dibebani wajib bukti. Hal ini juga dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon maka menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti surat, maka bukti P dapat diterima dalam perkara ini. Berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini.

Didalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri mengenai perselisihan dan pertengkaran karena sejak awal tahun 2016 Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai 1 orang anak, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak awal tahun 2016 Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

¹³⁰ Sayyidi Jindan, "Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Konvensional", <https://www.kompasiana.com/sayyidijindan/59b68eceab12ae1da32b48b2/perkawinan-sirri-dan-akibat-hukumnya-dalam-perspektif-hukum-konvensional>, diakses 30 Maret 2020.

Disamping itu, hakim merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpecah belah, Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak memiliki iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya bersama Pemohon. Sehingga dalam hal ini, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon.¹³¹

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Setelah Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, majelis hakim wajib melaksanakan prinsip-prinsip persidangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya ialah prinsip setiap berperkara dikenakan biaya.

Dasar hukum tentang biaya perkara adalah ketentuan Pasal 121 Ayat (4) HIR dan Pasal 145 Ayat (4) RBg. Dalam kedua peraturan ini dikemukakan bahwa setiap orang yang bermaksud memasukkan perkaranya ke pengadilan harus terlebih dahulu membayar uang muka (*vorscot*) biaya perkara dan berapa habis biaya perkara secara keseluruhan akan diperhitungkan kemudian jika perkara sudah selesai disidangkan. Uang muka biaya perkara itu ditentukan oleh Ketua Pengadilan, selanjutnya berapa biaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara itu ditentukan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Jumlah keseluruhan biaya perkara dicantumkan dalam amar putusan dan sekaligus kepada siapa biaya perkara itu dibebankan. Di samping itu, Majelis Hakim juga harus mencantumkan biaya perkara yang telah dipergunakan itu secara rinci pada kaki putusan, lembar terakhir putusan sebagai pertanggung jawaban pengadilan kepada pihak-pihak yang berperkara.¹³²

Biaya perkara dalam bidang-bidang hukum perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2)

¹³¹Husin Ritonga, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara, tanggal 30 Januari 2020.

¹³²Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama*, 161.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: (1) Biaya perkara dalam bidang hukum perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon; (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.¹³³

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah diuraikan diatas, menurut peneliti putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam perkara perceraian Nomor 2952/Pdt.G/PA.Smg telah sesuai dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang ada. Meskipun dalam hal ini hakim menisbatkan perkara perceraian tersebut terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun disini terselip peristiwa hukum yang disebut poliandri. Poliandri tersebut terlihat pada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon mendapati Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak.

Menurut hemat peneliti meskipun hakim tidak mendalami kasus poliandri dalam perkara ini, namun peneliti merasa bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Semarang menjatuhkan talak satu raj'i tersebut tidak terlepas dengan adanya penemuan hukum terhadap peristiwa poliandri sebagai penyebab terjadinya perceraian tersebut.

Adapun mengenai peristiwa poliandri, Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara langsung mengenai poliandri sebagai alasan perceraian. Sehingga dalam perkara ini hakim menisbatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai alasan terjadinya perceraian.¹³⁴ Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Dalam rangka menemukan hukum, isi ketentuan Pasal 10 Ayat (1) tersebut hendaknya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

¹³³ Mardani, *Hukum Acara*, 97.

¹³⁴ Husin Ritonga, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara, tanggal 30 Januari 2020.

Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Ketentuan pasal di atas, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.¹³⁵

Dalam perkara perceraian Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg meskipun dalil-dalil atau bukti-bukti telah sesuai untuk dapat dijadikan alasan hakim untuk memutus perkara cerai talak tersebut, yang mana perkara ini dinisbatkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut hemat peneliti, tentunya hakim akan menggali lebih dalam mengenai apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut. Karena jika alasannya hanya terbatas pada itu saja, maka hakim akan berusaha supaya kedua belah pihak tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya. Karena dalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang ada permasalahan yang menimpa dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi hal tersebut dapat diselesaikan baik-baik oleh kedua belah pihak demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Yang menjadi permasalahan disini ialah bahwa pihak Termohon telah menikah sirri dengan pria lain dan telah dikaruniai seorang anak dari perkawinan tersebut. Hal tersebut sangatlah menyakitkan bagi Pemohon, karena itu artinya Termohon dapat dikategorikan telah melakukan poliandri yakni melangsungkan perkawinan dengan lebih dari seorang pria dalam waktu yang bersamaan, Termohon telah berkhianat kepada Pemohon, dan juga Termohon sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk mempertahankan rumah tangganya kepada Pemohon, sehingga perceraian menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya.

Berbeda dengan halnya seorang pria memiliki istri lebih dari satu orang atau biasa dikenal dengan sebutan poligami, namun tidak jarang ditemukan seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami atau biasa dikenal dengan sebutan poliandri seperti halnya dalam kasus ini. Dalam hal poligami diperbolehkan baik dalam hukum agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedangkan mengenai poliandri, baik dalam hukum agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia, poliandri hukumnya dilarang dan juga haram.

Dalam memutus perkara cerai talak karena poliandri ini, hakim tidak menggunakan teori-teori atau kebijakan tersendiri, melainkan ini semua telah dinisbatkan pada ketentuan Pasal 19

¹³⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), 7.

Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga hakim menggunakan asas kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah filsafat hukum Islam (ushul fiqh).¹³⁶

Namun disini, secara tidak langsung hakim telah melakukan penemuan hukum dalam mempertimbangkan dan memutus perkaranya. Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum.¹³⁷

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.¹³⁸

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverwijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum).¹³⁹

Sedangkan menurut John Z. Laodoe, mengemukakan bahwa penemuan hukum adalah penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu terdapat dalam undang-undang yang ada.¹⁴⁰

Penemuan hukum, berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian dan jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum, yang lebih atau kurang, secara cermat dan teliti mengemukakan bagaimana terhadap situasi-situasi problematik tertentu seyogianya harus diberikan reaksi.¹⁴¹ Asumsi dasar yang melandasi penemuan hukum tersebut adalah berkaitan dengan pengakuan bahwa tidak semua hukum dapat ditemukan dalam undang-undang.¹⁴²

Dalam situasi masyarakat dengan tingkat perkembangan di segala bidangnya sangat tinggi dan kompleks, seringkali undang-undang tidak dapat lagi mengantisipasi perkembangan itu, tetapi disinilah letak peranan hakim selaku penjaga hukum dan keadilan memainkan peranannya.

¹³⁶ Husin Ritonga, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara, tanggal 30 Januari 2020.

¹³⁷ B. Arief Sidharta, *Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Unpad, 1999), 15-17.

¹³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 37.

¹³⁹ N.E. Algra dan Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, 359.

¹⁴⁰ John Z. Laodoe, *Menemukan Hukum*, 69.

¹⁴¹ J.A. Pontier, *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Laboratorium Hukum Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001), 1.

¹⁴² *Ibid.*, 16.

Oleh karena itu, Bregstein pernah mengatakan:¹⁴³ “*Tegenover de worden der wet komt hem echter een vrijheid toe. Hij is dus niet ‘la bouche de la loi,’ tenzij men daaronder verstaat ‘la bouche de l’esprit de la loi’.*” (Terhadap kata-kata undang-undang penerap undang-undang memiliki suatu kebebasan yang luas. Jadi dia bukanlah ‘mulut undang-undang’ tetapi ‘mulut jiwa undang-undang’).

Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks, yang pada dasarnya dimulai sejak hakim memeriksa kemudian mengadili suatu perkara hingga dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Kegiatan-kegiatan hakim itulah pada umumnya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, tetapi momentum dimulainya suatu penemuan hukum ialah setelah peristiwa konkretnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah peristiwa konkret yang telah dikonstatasi tersebut harus dicari atau diketemukan hukumnya.¹⁴⁴

Dalam suatu persidangan, hakim tentunya akan menyelidiki apakah ada hubungan hukum yang menjadi perkara itu benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum ini harus dibuktikan dimuka hakim dan ini adalah tugas kedua belah pihak yang berperkara untuk memberikan bahan-bahan bukti yang diperlukan, membuktikan dalam arti membenarkan hubungan hukum.¹⁴⁵

Jadi, dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim harus melakukan 3 (tiga) tahap tindakan di persidangan, yaitu sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Tahap Mengkonstatir

Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, di mana dalam perkara perdata, sebagaimana dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi, akan dapat dihindarkan dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan gegabah.

Sebagai contoh: jika dalam perkara perdata adalah para pihak yang berperkara yang wajib untuk membuktikan melalui penggunaan alat-alat bukti. Dalam tahap konstatir ini kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini.

Dalam perkara ini, hakim mengkonstatir suatu peristiwa yang diajukan kepadanya yaitu dengan menggunakan pembuktian. Pembuktian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memeriksa perkara ini ialah dengan 2 (dua) alat bukti, yakni alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

¹⁴³ M.H. Bregstein, dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumnus, T.th.) 16.

¹⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 80.

¹⁴⁵ Elise T. Sulistini, Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis*, 32.

¹⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, 92-94.

2. Tahap Mengkualifikasi

Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum (apakah itu pencurian, penganiayaan, perzinaan, percekcoakan terus-menerus, perjudian, atau peralihan hak, perbuatan melawan hukum, dan sebagainya).

Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi jika tidak jelas atau tidak tegas hukumnya, maka hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, tetapi lebih dari itu ia harus menciptakan hukum, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zamannya.

Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Agama Semarang mengkualifisir atau menggolongkan perkara Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg termasuk dalam perkara perceraian yang disebabkan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun disini, sebaiknya hakim menggali lebih dalam apa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara kedua belah pihak. Dalam perkara ini, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara kedua belah pihak dikarenakan pihak Pemohon mendapati Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari perkawinan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka hakim dapat menggolongkan peristiwa ini sebagai poliandri, yang mana dibuktikan dengan Termohon yang telah menikah sirri dengan laki-laki lain pada waktu ia masih terikat perkawinan dengan Pemohon.

3. Tahap Mengkonstituir

Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri, demikian sebagaimana dikemukakan oleh Sir Alfred Denning, seorang hakim Inggris yang terkenal.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya *in concreto* terhadap peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*). Di sini hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari *premis mayor* berupa aturan hukumnya dan *premis minor* berupa perbuatan/tindakannya.

Kendati penyebab terjadinya perceraian tersebut dikarenakan adanya peristiwa poliandri sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun, dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Agama Semarang menjatuhkan putusan dengan menisbatkan perceraian disebabkan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan yang menyatakan bahwa poliandri merupakan alasan terjadinya perceraian.

Oleh karenanya, meskipun alasan poliandri tersebut bukanlah yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menjatuhkan putusannya, namun peneliti merasa bahwa poliandri adalah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon. Karena apabila poliandri bukanlah alasan hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka hakim akan melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak supaya dapat mempertahankan rumah tangganya.

Jika diperhatikan secara saksama, maka gambaran proses ataupun cara penemuan hukum dapat diamati dengan dimulai pada tahap kualifikasi dengan menilai peristiwa konkret yang dianggap benar-benar telah terjadi itu atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa konkret tersebut, dengan mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.

Proses selanjutnya adalah hakim akan menetapkan hukumnya terhadap peristiwa konkret tersebut, dimana jika peraturannya jelas, hakim hanya akan menerapkan ketentuan peraturan tersebut sesuai dengan peristiwa konkret yang terjadi. Akan tetapi, dalam hal peraturan sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*) dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan, atau dalam hal peraturannya tidak ada atau tidak mengaturnya, sehingga terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), maka hakim akan memutuskan suatu perkara berdasarkan metode-metode penemuan hukum yang dikenal selama ini.

Pada proses penemuan hukum oleh hakim, perlu dibedakan dua hal, yaitu mengenai tahap sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) dan tahap sesudah pengambilan putusan (*ex post*).¹⁴⁷ Dalam perspektif teori penemuan hukum, yang terjadi sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) disebut heuristika, yaitu proses mencari dan berpikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini berbagai argumentasi yang bersifat pro maupun kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang lain, kemudian ditentukan mana yang paling tepat. Adapun penemuan hukum yang terjadi sesudah

¹⁴⁷ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, 49.

putusan hakim (*ex post*) disebut legitimasi, di mana legitimasi itu berkenaan dengan pembenaran dari putusan yang sudah diambil. Pada tahap ini putusan diberi motivasi (pertimbangan) dari argumentasi secara substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu putusan hukum tidak bisa diterima oleh forum hukum, maka berarti putusan itu tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, premis-premis baru harus diajukan, dengan tetap berpegang pada penalaran *ex ante*, untuk meyakinkan forum hukum tersebut agar putusan itu dapat diterima.¹⁴⁸

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Dalam hal ini, tidak menganut pandangan legisme yang hanya menerima undang-undang saja sebagai satu-satunya hukum dan sumber hukum. Sebaliknya di sini, hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum, yaitu undang-undang kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat.¹⁴⁹

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasanya hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk menemukan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas maka harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu agar nantinya dapat diterapkan dalam peristiwanya. Oleh karenanya, diperlukan ilmu bantu berupa metode penemuan hukum.

Tentang pembagian metode penemuan hukum ada beberapa pendapat, dengan mendasarkan pada pandangannya masing-masing. Sudikno Mertokusumo, secara garis besar membedakan metode penemuan hukum ini menjadi tiga:

1. Metode interpretasi, atau metode penafsiran digunakan dalam hal peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak atau kurang jelas.
2. Metode argumentasi digunakan dalam hal aturan perundang-undangannya tidak lengkap atau tidak ada.
3. Metode konstruksi hukum atau eksposisi diperuntukkan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, yaitu dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.¹⁵⁰

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Adapun perbedaan antara dua metode tersebut menurut Achmad Ali adalah pada interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks. Sedangkan pada konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir*, 165.

¹⁵⁰ *Ibid.*, 21.

mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹⁵¹

Menurut hemat peneliti, meskipun tidak ada aturan yang mengatur bahwa poliandri dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian, namun disini terlihat bahwa hakim melakukan penemuan hukum, yakni dengan melalui metode penafsiran, argumentasi, dan juga konstruksi hukum maka metode-metode penemuan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg.

Dalam perkara ini, menjadi syarat bagi seorang muslimah yang akan menikah ialah ia tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan laki-laki lain. Jika seorang muslimah sedang terikat dalam perkawinan dan ia akan menikah dengan laki-laki lain, maka perkawinan barunya itu tidak memenuhi syarat. Jika perkawinan itu tidak memenuhi syarat, maka perkawinan itu batal. Sehingga ketika ada perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan maka perkawinan itu harus dibatalkan. Dan pembatalannya itu melalui putusan pengadilan agama sesuai dengan permohonan pemohon untuk diputusnya perkawinan baru tadi.

Dikarenakan poliandri itu tidak sah menurut hukum Islam, maka perkara ini melanggar sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga hakim memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh seorang hakim yakni: tahap mengkonstatir, mengkualifikasi, mengkonstituir dan metode-metode penemuan hukum oleh hakim seperti metode penafsiran, argumentasi, dan juga konstruksi hukum, peneliti menyimpulkan bahwa perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg dapat dikategorikan perkara cerai talak karena poliandri.

¹⁵¹*Ibid.*, 164.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Perkara Cerai Talak Karena Poliandri di Pengadilan Agama Semarang

Penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang mengacu pada ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Menurut peneliti, mengenai prosedur, proses, dan pemeriksaan perkara cerai talak Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

Tahap utama yang harus dilakukan oleh Pemohon ialah mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Semarang dengan membawa surat permohonan dan juga melampirkan persyaratan-persyaratan. Setelah semua persyaratan yang diajukan oleh Pemohon dirasa lengkap oleh Panitera pengadilan, maka Pemohon harus membayar panjar biaya perkara yang tertera pada SKUM. Setelah pembayaran panjar, kasir membukukan, menandatangani, memberi nomor perkara, dan membubuhi tanda tangan disertai keterangan lunas dari SKUM.

Selanjutnya, surat permohonan diberi nomor perkara dan didaftarkan pada buku register perkara, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja surat permohonan tersebut harus sudah diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk dilakukan Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang akan memeriksa dan memutus perkara.

Dalam perkara cerai talak Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut ialah Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Shodiq, S.H. dan Drs. H. Ahmad Manshur Noor masing-masing sebagai Hakim Anggota. Setelah Ketua Majelis menerima PMH dan berkas perkara dari Ketua Pengadilan, selanjutnya Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, dalam waktu satu minggu setelah mempelajari berkas tersebut, Majelis Hakim membuat Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk menentukan hari sidang pertama. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Panitera Sidang, dalam perkara ini, Drs. H. Budiyo sebagai Panitera Pengganti. Selanjutnya, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan.

Dalam sidang pertama, hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak (Pemohon dan Termohon). Dikarenakan pihak Termohon yang sudah dipanggil secara patut dan resmi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya hadir di persidangan, dalam sidang pertama hakim memutus perkara secara verstek, menunda persidangan selama satu minggu dan memerintahkan Juru Sita memanggil kembali pihak Termohon untuk menghadiri persidangan selanjutnya. Namun pada hari sidang

kedua, Termohon yang sudah dipanggil secara patut dan resmi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya hadir di persidangan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya adalah pembacaan surat permohonan oleh Pemohon. Dalam surat permohonannya, Pemohon mempertahankan dalilnya untuk tetap bercerai dengan Termohon. Dikarenakan pihak Termohon atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, maka tidak ada tahap replik duplik diantara keduanya. Maka pada sidang berikutnya adalah pembuktian. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan bukti Surat dan 2 (dua) orang saksi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Selanjutnya adalah tahap kesimpulan, dalam perkara ini Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon (istrinya). Pada tahap akhir yakni putusan atau penetapan hakim. Sebelum menjatuhkan putusan atau penetapannya, maka majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu guna mempertimbangkan apakah perkara tersebut akan dikabulkan atau ditolak.

Dalam perkara ini, hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Dalam amar putusannya, hakim mengadili : Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang; Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya, Pengadilan Agama Semarang menentukan hari sidang pelaksanaan ikrar talak. Penyaksian ikrar talak dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya dihadapan Majelis Hakim. Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak oleh Pengadilan Agama Semarang.

2. Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Karena Poliandri Dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg

Dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg, hakim menisbatkan alasan terjadinya perceraian disebabkan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut peneliti, penisbatan alasan tersebut yang digunakan hakim sebagai alasan perceraian adalah kurang tepat. Hakim sebagai seorang

penegak hukum dan keadilan tentunya akan berusaha memberikan keadilan sesuai dengan harapan rakyat pencari keadilan.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon ditemukan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara keduanya ialah Termohon telah menikah sirri kepada laki-laki lain dan telah dikaruniai seorang anak dari perkawinan tersebut. Dalam hal ini, hakim merasa bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun kembali diantara keduanya. Selain itu, bahwa Termohon sudah tidak memiliki iktikad baik lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menurut peneliti, meskipun tidak ada aturan yang mengatur bahwa poliandri dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian, disini terlihat bahwa hakim melakukan penemuan hukum, yakni dengan melalui metode penafsiran, argumentasi, dan juga konstruksi hukum maka metode-metode penemuan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg. Peneliti menyimpulkan bahwa perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg dapat dikategorikan perkara cerai talak karena poliandri.

B. Saran-saran

1. Untuk seluruh masyarakat, bahwa perceraian itu merupakan perkara yang halal namun hal tersebut di benci Allah. Oleh karenanya sebisa mungkin kita yang telah melangsungkan ikatan suci perkawinan, hendaknya menjaga sepenuh hati kesucian ikatan tersebut. Perkawinan adalah suatu ibadah, maka hendaknya kita semua senantiasa menjaga ibadah itu sampai akhir hayat kita. Menjaga kesetiaan terhadap pasangan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.
2. Masih ditujukan untuk seluruh masyarakat, sebelum hendak melakukan perkawinan maupun perceraian, kita perlu memikirkan secara matang apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan kita tersebut. Ketika perceraian lebih banyak mendatangkan kemaslahatan, maka hal tersebut harus dilakukan guna mencegah kemadaramatan. Namun sebisa mungkin kita tetap menjaga keutuhan rumah tangga kita. Dalam rumah tangga memang tidak selalu berjalan dengan mulus, oleh karenanya kita harus pandai menyikapi dan berpikir secara dewasa untuk menemukan jalan keluar permasalahan yang ada, sehingga hal tersebut dapat menghindari kita dari perceraian. Ketika kita telah menjadi pasangan dari suami atau istri kita, maka kita

harus menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan kita masing-masing karena sejatinya manusia tidak ada yang sempurna. Perlunya ada kesadaran masyarakat, terlebih dalam kasus ini yang mana seorang wanita yang masih dalam ikatan suci perkawinan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain secara sirri, dalam hal ini ia dapat dikatakan poliandri. Poliandri sungguh dilarang dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan haram dalam hukum Islam. Berbeda dengan halnya poligami yang diperbolehkan baik dalam hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk para hakim, khususnya Hakim Pengadilan Agama Semarang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Bahwa kecermatan dan ketelitian hakim sangat diperlukan guna mengadili perkara dengan seadil-adilnya. Sehingga masyarakat tidak merasa diciderai oleh hukum dan keadilan. Terkadang hakim perlu melakukan penemuan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang selalu berkembang dalam masyarakat, akan tetapi belum ada peraturan yang mengaturnya ataupun peraturan tersebut telah ada namun kurang jelas. Hal tersebut supaya dapat menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Algra, N.E dan Van Duyvendijk. *Mula Hukum*, oleh J.C.T Simorangkir dkk., Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung Tbk, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, cet VII, 2016.
- Al-Nabhani, Syeh Taqiyudin. *al-Nizham al-Ijtima fi al-Islam*. Bayrut: Darul Ummah, 2003.
- Al-Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*.Juz. 2. Dar al-Fikr, t.th.
- al-Syâfi'i, Imam. *al-Umm*. Juz V. Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah. Lihat juga al-Syâfi'i Imam. *Ahkam Alquran*. Juz. I. Bayrut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1989.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Arto, A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- . *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- . *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet V, 2004.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, cet 1, 2018.
- Bregstein, M.H. dalam Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, T.th.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ensiklopedia Indonesia. Jilid V. Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hakim, Ali Husein., et al., *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*. Terj. A.H Jemala Gemala. Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Halim, Muhammad Abdul. *Memahami Al-Qur'an dan Pendekatan Gaya dan Tema*. Bandung: Marja, 2002.

- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Intrepetasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Laudoe, John Z. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2016.
- _____. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, cet 11, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- _____. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- _____. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- _____. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, cet v, 2007.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Jogjakarta: Penerbit Academia, 2012.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA, 1947.
- Pontier, J.A. *Rechtsvinding*. diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Laboratorium Hukum Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001.
- Rasyid, A. Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.
- Rato, Daminikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- RI, Mahkamah Agung. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.

- Rohman, Taufiq dkk., *Sosiologi 3, Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Ghalia Indonesia, Yudhistira, t.th.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Saebani, Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- . *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009. Lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama, cet I, 2009.
- Sidharta, B. Arief. *Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Unpad, 1999.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Sulistini, Elise T. dan Rudy T. Erwin. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, cet II, 1987.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, cet 1, 2014.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Ed. 1. Depok: Rajawali Pers, cet 1, 2018.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, cet II, 1986.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta, 1992.
- Syafi'i, Imam. *Akhmalul Qur'an Juz I*. Bayrut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1985.
- Syaifuddin, Muhammad., Et. Al., *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- , dkk., *Hukum Perceraian*. Bandung: Sinar Grafika, cet 2, 2014.
- , Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, cet 3, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tihami, MA dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

B. Jurnal, Karya Ilmiah, Internet

- Abbas Hutagalung, Rudianto. "Praktik Poliandri Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar", *JOM Fakultas Hukum*, vol. IV, 2017.
- Arwani, Miftahul. "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta. 2008.

- Astricha. “Perceraian Menurut Islam dan Dalilnya”. <https://dalamislam.com/hukum-islam/perceraian-menurut-islam>. 12 Januari 2020.
- Asyrof, Mukhsin. “Asas-asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan”, *Artikel dalam Varia Peradilan*, no. 252, 2006.
- Erwinsyahbana, Tengku. “Sistem Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. 2, 2012.
- <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, 12 Februari 2020.
- <https://tafsirweb.com/10982-surat-at-talaq-ayat-2.html>, 7 Januari 2020.
- <https://tafsirweb.com/1535-quran-surat-an-nisa-ayat-3.html>, 30 Maret 2020.
- <https://tafsirweb.com/1556-surat-an-nisa-ayat-24.html>, 7 Januari 2020.
- <https://tafsirweb.com/1566-quran-surat-an-nisa-ayat-34.html>, 30 Maret 2020.
- <https://tafsirweb.com/1567-quran-surat-an-nisa-ayat-35.html>, 20 April 2020.
- <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, 7 Januari 2020.
- <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>, 7 Januari 2020.
- <https://tafsirweb.com/867-surat-al-baqarah-ayat-227.html>, 12 Januari 2020.
- <https://tafsirweb.com/871-surat-al-baqarah-ayat-229.html>, 16 Januari 2020.
- <https://www.pasemarang.go.id/images/SOP%20Penerimaan%20dan%20Pendaftaran%20Perkara.pdf>, 12 Februari 2020.
- Ja’far, A. “Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis”, *Al-‘Adalah*, vol. X, no. 3, 2012.
- Jindan, Sayyidi. “Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Konvensional”, <https://www.kompasiana.com/sayyidijindan/59b68eceab12ae1da32b48b2/perkawinan-sirri-dan-akibat-hukumnya-dalam-perspektif-hukum-konvensional>, diakses 30 Maret 2020.
- Pardi, “Analisis Perkawinan Poliandri menurut Hukum Islam (Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010/PA.Pbr)”, *Skripsi* UIN Riau Sultan Syarif Kasim. Pekanbaru. 2013.
- Rifa’i, Robet “Analisis terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang. 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur’an.

Hadis.

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Ritonga, Husin. Wawancara. Pengadilan Agama Semarang, 30 Januari 2020.

Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Semarang Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg.

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN DENGAN Drs. HUSIN RITONGA M.H (HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A SEMARANG)

1. Poliandri sebagai alasan perceraian termasuk dalam kategori apa? Apakah sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang?
3. Bagaimana mekanisme pemeriksaan perkara dalam persidangan terhadap perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang?
4. Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg?
5. Bagaimana dan apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak karena poliandri dalam Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg?
6. Apa perlu adanya pembuktian dalam perkara poliandri tersebut?
7. Adakah teori-teori atau kebijakan tersendiri yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai talak karena poliandri tersebut?

LAMPIRAN 2

PUTUSAN

Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman, Kabupaten Pemalang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Garmen, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Semarang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 19 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX sebagaimana Duplikat nomor Kk. 11.33.06/Pw.01/81/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 (tujuh) tahun sebagaimana alamat Termohon di atas serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK I, berumur 9 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara sirri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2016 disebabkan Pemohon marah mendapati Termohon telah menikah lagi dan memiliki anak;
6. Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- (a) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.33.06/Pw.01/81/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- (a) Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- (b) Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- (c) Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
- (d) Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon ;
- (e) Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- (f) Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi pertengkaran ;
- (g) Bahwa pada tahun 2016 saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran ;
- (h) Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain bahkan telah mempunyai satu orang anak ;
- (i) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1,½ tahun yang lalu hingga sekarang ;
- (j) Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi Pemohon ke rumah orang tuanya di Pemalang ;
- (k) Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi ;
- (l) Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- (m) Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- (a) Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- (b) Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon ;
- (c) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon ;
- (d) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;

- (e) Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran ;
- (f) Bahwa saksi pernah melihat mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- (g) Bahwa setahu saksi penyebabnya, karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan telah mempunyai 1 orang anak hasil hubungan dengan laki-laki tersebut ;
- (h) Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1,½ tahun hingga sekarang ;
- (i) Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi ;
- (j) Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun belum berhasil ;
- (k) Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah mencukupinya dan bersedia mengucapkan sumpah tambahan dalam perkara ini kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan sudah dikaruniai satu orang anak dan sejak tahun 2016 sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, oleh karena itu yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon maka menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit perceraian dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti surat, maka bukti P dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri mengenai perselisihan dan pertengkaran karena sejak awal tahun 2016 Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai 1 orang anak, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- 2) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak awal tahun 2016 Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai satu orang anak ;

3) Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadilakhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. HusinRitonga, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Shodiq, S.H.** dan **Drs. H.Ahmad Manshur Noor** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Budiyo** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Shodiq, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Drs. H. Ahmad Manshur Noor

Panitera Pengganti,

Drs. H. Budiyo

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 451.000,00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silmi Ladyaldina Adnani
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 3 Agustus 1998
Alamat : Jl. Bukit Kelapa Kopyor B.1 No. 16 RT 5 RW 14
Kel. Meteseh Kec. Tembalang Bukit Kencana Jaya
Semarang.
Umur : 21 Tahun
Agama/Status : Islam/Mahasiswa
No. HP : 085712242204

PENDIDIKAN

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. SD ISLAM SULTAN AGUNG 4 SEMARANG | Tahun 2010 |
| 2. SMP NEGERI 6 SEMARANG | Tahun 2013 |
| 3. SMA NEGERI 14 SEMARANG | Tahun 2016 |

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 17 April 2020

Hormat Saya,



Silmi Ladyaldina Adnani